

**RANCANGAN STRATEGIS 2021-2026  
(RENSTRA)**



**PEMERINTAHAN KOTA SOLOK  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Tembok Raya Kota Solok  
Kode Pos 27326  
(0755) 20334 Fax (0755)  
20334  
[disdik@solokkota.go.id](mailto:disdik@solokkota.go.id)

# BAB I

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang salah satunya mengatur tentang penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Solok dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Dinas Pendidikan Kota Solok maka Dinas Pendidikan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Solok, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya

bidang Pendidikan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pendidikan Kota Solok sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Solok; dan
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Pendidikan adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Solok khususnya bidang Pendidikan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I      Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II     Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan**

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan.

#### **BAB III    Isu Strategis**

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

**BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Solok 2021-2026.

**BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan**

Berisi strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Solok 2021-2026.

**BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

**BAB VIII Penutup**

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Penyelenggaraan urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah yang merupakan faktor utama untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pembangunan yang dilaksanakan.

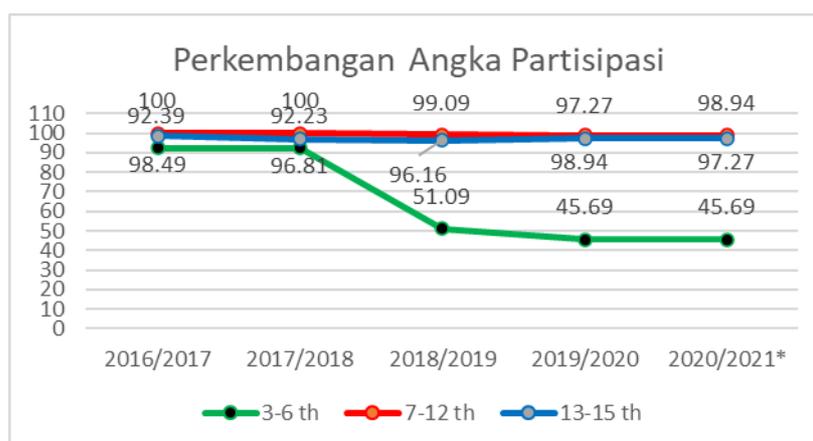
Secara umum gambaran penyelenggaraan pendidikan di Kota Solok dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

### 1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

APS dapat dilihat dari perbandingan jumlah siswa, terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing tingkat pendidikan. Berdasarkan pengolahan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, rentang umur yang digunakan adalah tingkatan PAUD adalah usia 3 - 6 tahun, tingkatan SD/Sederajat digunakan rentang usia 7 - 12 tahun dan tingkatan pendidikan SLTP/Sederajat digunakan rentang usia 13 – 15 tahun.

Gambar 2.1  
Angka Partisipasi Sekolah



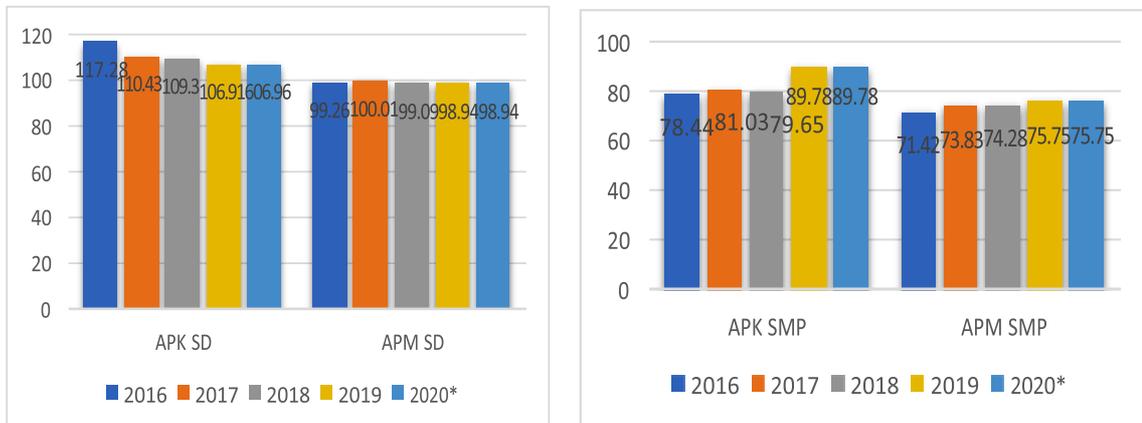
Sumber : Jendela Data dan Neraca Pendidikan Daerah, Kemdikbud dan Badan Data Statistik (\*Tahun 2020/2021 data sementara)

Dari gambar di atas terlihat berdasarkan data Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI, partisipasi PAUD Kota Solok pada tahun 2020/2021 baru mencapai 45,69 yang artinya dari jumlah total penduduk di Kota Solok yang berusia 3 sampai 6 tahun baru telah mengikuti pendidikan anak usia dini, baik di PAUD formal maupun informal.

Dari gambar diatas terlihat Angka Partisipasi Sekolah di Kota Solok Pada usia 7 -12 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 rata rata telah mencapai 100% demikian juga pada usia 13 – 15 tahun dari tahun 2016 sampai 2020 terlihat sudah diatas 95%.

Angka partisipasi sekolah dapat dijadikan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah secara umum, Angka tersebut hanya memperhitungkan jumlah penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Oleh karena itu untuk melihat lebih detailnya gambaran tingkat partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase, kegunaanya untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Oleh karena itu dalam penghitungan APK, jumlah siswa yang dihitung merupakan jumlah total siswa tanpa memperhitungkan rentang usia siswa sehingga besar kemungkinan APK memiliki nilai lebih besar dari 100%. sedangkan APM menunjukkan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase kegunaannya untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai oleh karena itu dalam penghitungannya memperhitungkan rentang usia siswa.

**Gambar 2.2**  
**APM dan APK Tingkat SD dan SMP Tahun 2016 – 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik (\* Tahun 2020 Data Sementara)

Berdasarkan table diatas, jika dibandingkan angka APM tahun 2016-2020 yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan APK dapat diartikan masih terdapat siswa yang bersekolah di jenjang SD dan SMP/MTS yang tidak sesuai dengan umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun atau Angka Partisipasi Murni (APM) baik tingkat SD yang rata-rata berkisar 93 - 100% dan ditingkat SMP yang rata-rata berkisar dari 71-90 %, walaupun masih dipengaruhi faktor- faktor lain seperti Penduduk Kota Solok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah diluar Kota Solok dan tidak bersekolah/putus sekolah.

## 2. Gambaran Ketersediaan Sekolah, Ruang Kelas dan Kondisi Ruang Kelas

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Berikut gambaran ketersediaan sekolah pendidikan dasar di Kota Solok tahun 2016-2020, berdasarkan data sekolah yang terdaftar dan tersedia pada neraca pendidikan daerah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI dan data kependudukan Kota Solok.

**Tabel 2.1**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia**  
**Sekolah Kota Solok Tahun 2016 – 2020**

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	unit/murid	1: 183	1: 190	1: 191	1: 190	1: 190 *
	Jumlah sekolah	unit	43	44	45	46	46
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 th	murid	7886	8366	8612	8739	8739*
	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 7-12	Per 10.000	54.53	52.59	52.25	52.64	52.64*
2	SMP/MTs	unit/murid	1: 570	1: 598	1: 613	1: 601	1: 601*
	Jumlah sekolah	unit	7	7	7	7	7
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 th	murid	3990	4189	4288	4207	4207*
	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 13-15	Per 10.000	17.54	16.71	16.32	16.64	16.64*

Sumber : Jendela Data dan Neraca Pendidikan Daerah, Kemdikbud dan Dinas Dukcapil (\*Tahun 2020 Data Sementara)

Untuk melihat lebih detailnya daya tampung sekolah terhadap jumlah murid/siswa di Kota Solok, dapat dilihat melalui jumlah rombongan belajar dan ruang kelas yang tersedia.

**Tabel 2.2**  
**Rasio Rombel : Siswa dan Ruang Kelas : Rombel**

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	Rombel : Siswa	1:26	1:25	1:25	1:25	1:25*
	Ruang Kelas : Rombel	Na	Na	1:1	1:1	1:1*
2	SMP/MTs					
	Rombel : Siswa	1:31	1:31	1:31	1:31	1:31*
	Ruang Kelas : Rombel	Na	Na	1:1	1:1	1:1*

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (\* Tahun 2020 Data Sementara)

Selanjutnya gambaran kondisi layanan fasilitas pendidikan di Kota Solok dapat dilihat dari jumlah dan kondisi ruang kelas yang tersedia.

**Gambar 2.3**  
**Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas Kota Solok Tahun 2016 – 2020**



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (\* Tahun 2020 Data Sementara)

### 3. Akreditasi Sekolah

Untuk melihat mutu atau tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah dapat dilihat dari akreditasi sekolah yaitu kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang. untuk menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non - formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan

Akreditasi sekolah mencakup penilaian terhadap sembilan komponen sekolah, yaitu (a) kurikulum dan proses belajar mengajar; (b) administrasi dan manajemen sekolah; (c) organisasi dan kelembagaan sekolah; (d) sarana prasarana; (e) ketenagaan; (f) pembiayaan; (g) peserta didik; (h) peranserta masyarakat; dan (i) lingkungan dan kultur sekolah. Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek, dari masing-masing aspek dijabarkan lagike dalam indikator.

**Gambar 2.4**  
**Persentase (%) Akreditasi Sekolah Kota Solok Tahun 2016-2020**



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (\* Tahun 2020 Data Sementara)

Berdasarkan gambar diatas terlihat dari tahun 2016 sampai 2020 persentase Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Solok yang memiliki akreditasi A terus meningkat. Berdasarkan data dari neraca pendidikan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI, di tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2015 dari 43 Sekolah Dasar, 12 sekolah memiliki akreditasi A (27,9%) dan di tahun 2019 dari 46 Sekolah Dasar sudah 28 sekolah yang akreditasi A (60,9%). Sedangkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2015 dari 7 Sekolah Menengah Pertama, 2 sekolah akreditasi A (27,9%) dan di tahun 2019 dari 7 Sekolah Menengah Pertama sudah 5 sekolah yang akreditasi A (60,9%).

#### 4. Tenaga Pendidik/Guru

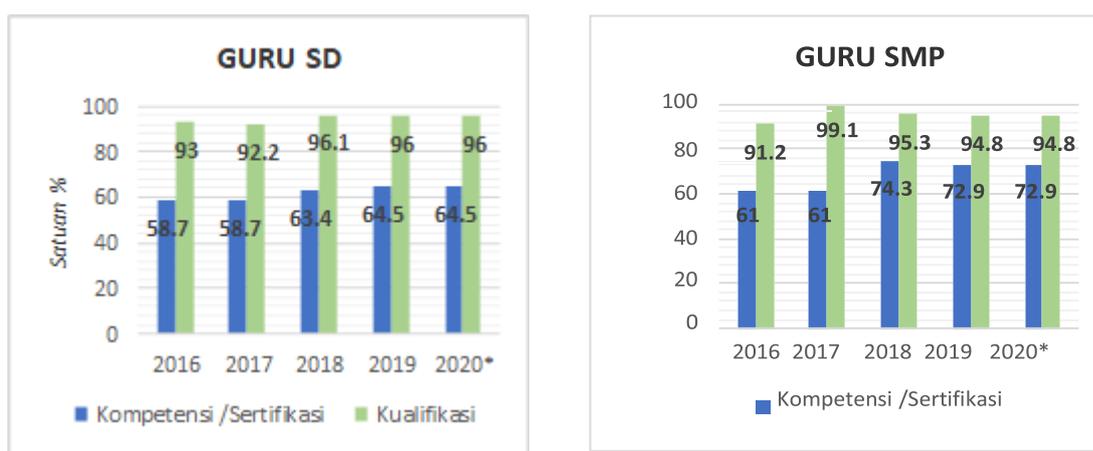
**Tabel 2.3**  
**Rasio Rombel : Siswa dan Ruang Kelas : Rombel**

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020*
1	SD/MI	Guru : murid	1:19	1:17	1:21	1:17	1:17
2	SMP/MTs	Guru : murid	1:17	1:16	1:18	1:16	1:16

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (\* Tahun 2020 Data Sementara)

Selanjutnya untuk melihat kondisi Kompetensi/Sertifikasi dan kualifikasi guru yang mengajar di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Solok, dapat dilihat dari grafik di bawah ini

**Gambar 2.5**  
**Persentase (%) Kompetensi/Sertifikasi dan Kualifikasi Guru SD dan SMP Kota Solok Tahun 2016-2020**



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (\* tahun 2020 data sementara)

## 5. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Indikator ini dapat menggambarkan kondisi anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

**Tabel 2.4**  
**Siswa Putus Sekolah dan Mengulang Kota Solok**  
**Tahun 2017 - 2020**

No	Jenjang Pendidikan	Siswa	2017	2018	2019	2020
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,08	0,07	0,03	0,03*
	Putus Sekolah	Siswa	7	6	3	3*
	Mengulang	Siswa	66	58	58	58*
2	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,17	0,11	0,02	0,02*
	Putus Sekolah	Siswa	8	5	1	1*
	Mengulang	Siswa	19	17	15	15*

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Solok dan Neraca Pendidikan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (\* Tahun 2020 data sementara)

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kota Solok, tugas pokok dari Dinas Pendidikan Kota Solok adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

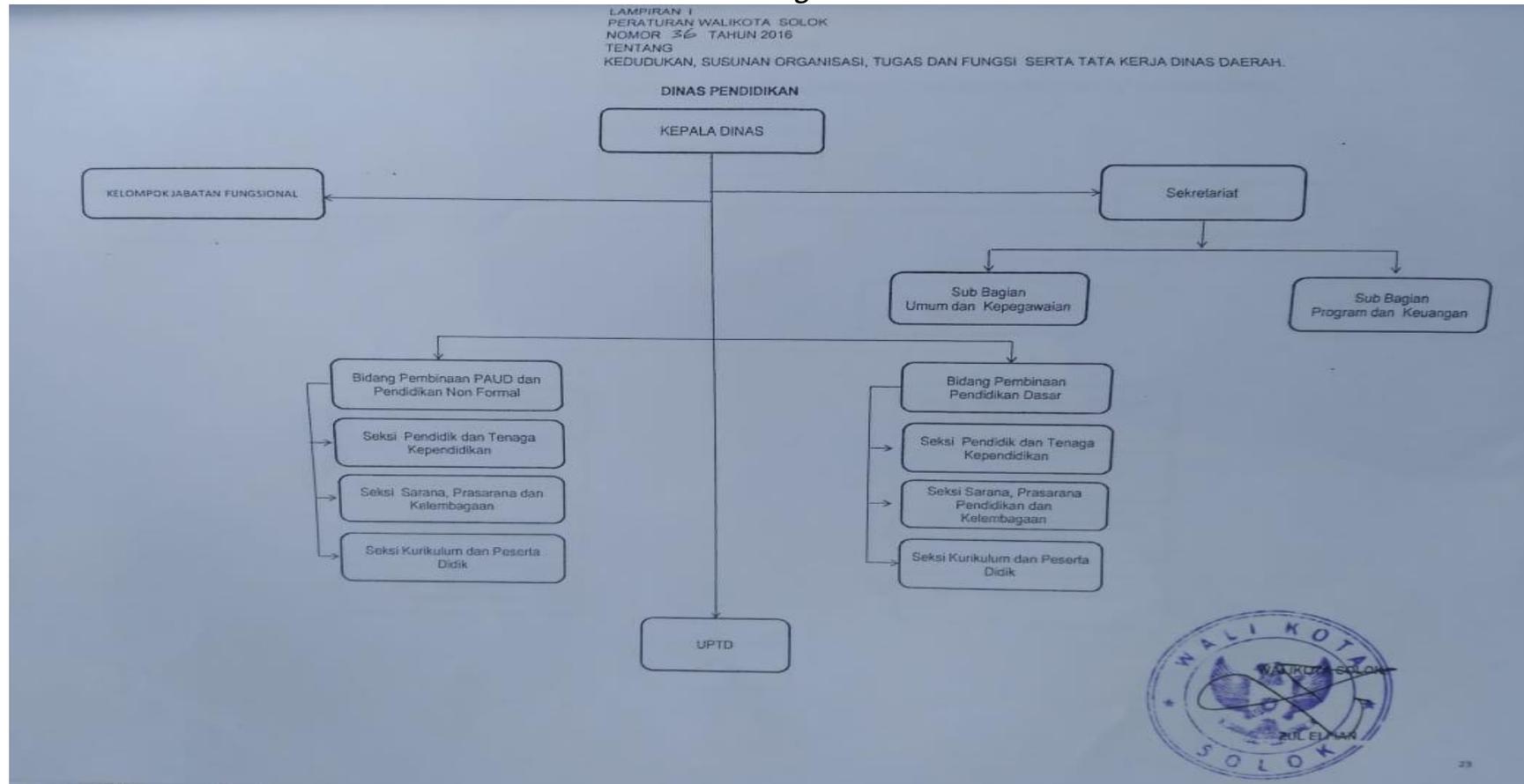
- 1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pendidikan dan tugas pembantuan.

- 2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas, menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan; dan
  - e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.1 Struktur Organisasi**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas pendidikan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.6  
Struktur Organisasi



### 2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas pendidikan, uraian tugas jabatan struktural Dinas pendidikan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas pendidikan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
  1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  2. Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan; dan
  3. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
  1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan dan Kelembagaan; dan
  3. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Solok

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

### a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Pendidikan di klasifikasikan ke dalam Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**JUMLAH ASN DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2020**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	DISDIK PNS		DISDIK NON PNS		SMP PNS		SD PNS		TK PNS		PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SMP SEDERAJAT	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
2	SMA SEDERAJAT	1	4	13	11	6	4	5	1	1	0	26	20	46
3	D2	0	0	0	1	1	2	3	2	0	0	4	5	9
4	D3	2	1	1	2	2	5	1	3	0	0	6	11	17
5	S1	12	19	2	25	39	161	58	322	0	29	111	527	638
6	S2	3	4	0	1	4	19	6	11	1	0	14	35	49
7	S3		1									0	1	1

Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2020**

No	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1	GOLONGAN II	0	4	4
2	GOLONGAN III	9	14	23
3	GOLONGAN IV	4	4	8

**b. Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7  
ASET TANAH DINAS PENDIDIKAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Peng gu naan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Ket	
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal					Nomor
1		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA</b>									3.241.330.000	
	<b>Tanah Bangunan Kantor Pemerintah</b>										
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1300	1985	Tembok					APBD	735.000.000	
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	20.000	1992	Biruhun					APBD	1.640.000.000	
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	10565	1992	Tembok					APBD	866.330.000	

Tabel 2.8  
Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)		Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Ket
		nama barang 108	Regi ster	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														9,935,999,596.00	
1		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen												4,053,314,196.00	
2		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0000 1	B		beton	Simpang Rumbio						APBD	82,060,000.00	
		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen											APBD	22,690,000.00	
		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen											APBD	12,221,100.00	
		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen											APBD	39,023,800.00	
	Rumah Tembok I	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen											APBD	1,320,000,000.00	
	Rumah Tembok II	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen											APBD	2,156,000,500.00	
	Rumah Dinas Bruhun	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen											APBD	2,175,000,000.00	
	<b>Monumen</b>													75,690,000.00	
		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen													

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Pendidikan.

### 2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan

Tingkat capaian kinerja Dinas pendidikan berdasarkan bidang urusan Pendidikan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9  
Tujuan Sasaran dan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET REALISASI CAPAIAN													
					2017			2018			2019			2020				
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan	Persentase Sekolah dengan rata-rata hasil Ujian Nasional (UN)	1. Akses Layanan Pendidikan yang merata bagi semua penduduk	1. Angka Melek Huruf	99.20	99.84	100.65	99.20	100.00	100.81	99.20	99.86	100.67	99.20	100.00	100.81		
				2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	10.79	10.95	101.48	10.81	11.01	101.85	10.82	11.01	101.76	10.82	11.03	101.94		
				3. Persentase sekolah dengan rata-rata hasil UN														
				- SD ( $\geq 7.7$ )	53.3	61.6	115.5	60.0	30.0	50.0	66.7	53.5	80.2	73.3	0.0			
				- SD diatas 7,7														
				- SMP diatas 6														
				4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)														
				- Usia 7 - 12 Tahun	100.00	100.00	100.00	100.00	99.09	99.09	100.00	99.00	99.00	100.00	98.94	98.94		
- Usia 13-15 Tahun	90.00	96.81	107.57	95.00	96.16	101.22	95.00	95.00	100.00	100.00	97.27	97.27						
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)																
			2. Kualitas	5. Persentase														

**Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pendidikan**

			penyelenggara pendidikan yang meningkat	tenaga pendidik yang memenuhi Kualifikasi Akademis kualifikasi S-1 (%)												
		Angka Melek Huruf (AMH) (%)		- SD	99.80	92.20	92.38	99.80	96.10	96.29	99.90	96.00	96.10	99.90	98.57	98.67
				- SMP	99.90	94.00	94.09	99.90	82.40	82.48	100.00	94.80	94.80	100.00	97.72	97.72
				<b>6. Persentase Tenaga Pendidik yang sudah sertifikasi</b>												
				- SD	86.00	91.00	105.81	89.00	63.40	71.24	93.00	64.50	69.35	95.00	53.95	56.79
				- SMP	89.00	92.00	103.37	91.00	74.30	81.65	92.00	72.90	79.24	95.00	59.34	62.46

**Tabel 2.10**  
**Capaian Kinerja Daerah Dinas Pendidikan**

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	2017			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>														
<b>Kesejahteraan Sosial</b>														
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>													
1.1.	Angka melek huruf	%	99.20	99.84	100.65	99.20	100.00	00.81	99.20	99.86	100.67	99.20	100.00	100.81
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10.79	10.95	101.48	10.81	11.01	101.85	10.82	11.01	101.76	10.82	11.03	01.94
1.3.	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	14.29	14.29	00.00	14.30	14.30	100.00	14.31	14.30	99.93	14.32	14.32	100.00
1.4.	Angka partisipasi kasar													
	- SD/MI/SDLB/Paket A/SDLB	%	10.03	108.80	98.88	110.03	107.10	97.34	110.03	104.70	95.16	110.03	108.00	98.16
	- SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	99.84	103.40	103.40	99.84	104.30	104.47	99.84	103.56	103.73	99.84	130.00	30.21
1.5.	Angka Partisipasi Murni													
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%	92.30	94.60	102.49	92.30	94.10	101.95	92.30	92.40	100.11	92.30	94.00	101.84
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	79.15	81.20	102.59	79.15	82.40	104.11	79.15	79.65	100.63	79.15	100.00	126.34
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>														
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>														
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>													
1.1	Angka partisipasi sekolah													
	- Usia 7-12 Tahun	%	100.00	100.00	100.00	100.00	99.09	99.09	100.00	99.00	99.00	100.00	98.94	98.94
	- Usia 13-15 Tahun	%	90.00	96.81	107.57	95.00	96.16	101.22	95.00	95.00	100.00	100.00	97.27	97.27
	- Usia 16-18 Tahun	%	100.00	82.45	82.45	100.00	85.91	85.91	100.00	85.91	85.91	100.00		
1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia													

**Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pendidikan**

	sekolah													
	- SD/MI	Unit/jiwa	0.15	0.16	92.09	0.15	0.17	86.45	1:153	1:190	117.37	1:152	1:175	89.15
	- SLTP/MTs	Unit/jiwa	0.34	0.35	95.92	0.34	0.37	90.61	1:430	1:604	135.51	1:430	1:422	101.63
	- SLTA/MA	Unit/jiwa							-	-				
1.3.	Persentase Jumlah Sekolah dengan Rasio Murid per ruang Kelas sesuai standar	%	96.00		-	96.00		-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.4.	Rasio guru/murid													
	- SD/MI	Guru/murid	0.06	0.05	106.10	0.06	0.06	101.22	1:20	1:17	96.25	1:20	1:15	93.75
	- SLTP/MTs	Guru/murid	0.06	0.05	105.00	0.06	0.05	102.50	1:20	1:16	95.00	1:20	1:14	92.50
	- SLTA/MA	Guru/murid												
1.5.	Persentase sekolah yang memenuhi rasio ketersediaan guru sesuai standar	%	92.00		-	94.00		-	96.00	98.00	102.08	97.00	99.00	102.06
1.6.	Angka Partisipasi PAUD	%	80.00		-	85.00	92.20	108.47	85.00	51.09	60.11	90.00	51.09	56.77
1.7.	Angka Putus Sekolah:										#DIV/0!			
	- Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	%	1.00	0.08	192.00	1.00	0.07	193.00	<1	3.00	197.00	<1	<1	100.00
	- Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	%	1.00	0.17	183.00	1.00	0.11	189.00	<1	1.00	198.00	<1	<1	100.00
	- Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA	%												
1.8.	Angka Kelulusan:													
	- Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	98.00	100.00	102.00	99.00	100.00	101.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%												
1.9.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV													
	- SD	%	99.80	92.20	92.38	99.80	96.10	96.29	99.90	96.00	96.10	99.90	98.57	98.67
	- SLTP	%	99.90	94.00	94.09	99.90	82.40	82.48	100.00	94.80	94.80	100.00	97.72	97.72
	- SMA/SMK/MA	%							-	-				

1.10.	Persentase Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi Akademis S1	%	87.00			90.00			93.00	96.00	103.23	96.00	98.24	102.33
1.11.	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik													
	- SD	%	86.00	91.00	05.81	89.00	63.40	71.24	93.00	64.50	69.35	95.00	53.95	56.79
	- SLTP	%	89.00	92.00	103.37	91.00	74.30	81.65	92.00	72.90	79.24	95.00	59.34	62.46
	- SLTA	%							-	-				
1.12.	Pendirian boarding school bernuansa islami	Unit				-			1.00	-		-		

**Tabel 2.11**  
**Capaian Kinerja Daerah Dinas Pendidikan**

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	2017			2018			2019			2020		
				Target	Realisasi	Capaian									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>															
<b>I</b>	<b>Pendidikan</b>														
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD formal/non formal yang terakreditasi A	PAUD	9.00	1.00	11.11	5.00	1.00	20.00	5.00	1.00	20.00	5.00	1.00	20.00
2		Persentase guru pendamping PAUD formal sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi		33.00	54.79	166.03	38.00	86.60	227.89	43.00	89.58	208.33	48.00	87.50	182.29
3		Persentase guru pendamping PAUD non formal sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi		7.34	14.42	196.46	9.63	Na	na	18.81	52.77	280.54	36.70	54.02	147.19
4	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio siswa per ruang kelas SD/SDLB/MTs		26.00	28.00	92.31	26.00	25.00	103.85	26.00	25.00	96.15	26.00	24.00	107.69
5		rasio siswa per ruang kelas SMP/MTs		32.00	32.00	100.00	32.00	31.00	103.13	32.00	31.00	96.88	32.00	31.00	103.13
6		Jumlah sekolah SD/MI yang terakreditasi A	sekolah	18.00	28.00	155.56	21.00	28.00	133.33	24.00	28.00	116.67	27.00	28.00	103.70
7		Jumlah sekolah SMP/MTs yang terakreditasi A	sekolah	5.00	5.00	100.00	6.00	5.00	83.33	6.00	5.00	83.33	6.00	5.00	83.33

8		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)													
		- SD	sekolah				1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- SMP	sekolah				0.00	-		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9		Persentase sekolah yang memiliki labor komputer yang representatif (SMP negeri)					50.00	50.00	100.00	66.70	66.70	100.00	83.30	100.00	120.05
10		Jumlah perolehan medali OSN SD/MI dan SMP/MTs	medali	2.00	-	-	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
11		Jumlah perolehan medali FLS2N SD/MI dan SMP/MTs	medali	2.00		-	2.00	-	0.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00
12	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi standar kualifikasi akademis													
		- SD		97.88	97.22	99.33	98.00	96.10	98.06	98.00	96.00	97.96	100.00	98.57	98.57
		- SMP/MTs		96.00	93.85	97.76	96.00	95.30	99.27	97.00	94.80	97.73	97.00	97.72	100.74
13		Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik:													
		- SD		75.00	91.00	121.33	85.00	63.40	74.59	90.00	82.00	91.11	95.00	53.95	56.79
		- SMP/MTs		85.00	92.00	108.24	90.00	74.30	82.56	95.00	86.00	90.53	100.00	59.34	59.34
14	Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga/kursus yang terakreditasi A	lembaga	1.00	-	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
15		Jumlah warga belajar yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	orang	75.00	330.00	440.00	80.00	80.00	100.00	85.00	95.00	111.76	90.00	0.00	0.00
16	Manajemen	Rata -Rata UN SD	nilai	7.70	7.80	101.30	7.70	7.48	97.19	7.70	7.71	100.13	8.00	-	

**Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pendidikan**

17	Pelayanan Pendidikan	Rata -Rata UN SMP	nilai	6.00	5.20	86.67	6.00	5.50	91.63	6.00	5.39	89.83	6.00	-		
18		Persentase siswa yg mengikuti kegiatan MABIT SLTP		90.00	90.00	100.00	90.00	90.00	100.00	90.00	80.00	88.89	90.00	90.00	100.00	
19	Pembinaan dan Pemasarakatan Seni dan Olahraga Pelajar	Jumlah perolehan medali Popda	medali	10.00	3.00	30.00	11.00	-	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	
20		Jumlah perolehan medali O2SN SD/MI dan SMP/MTs	medali	3.00	1.00	33.33	4.00	2.00	50.00	5.00	6.00	120.00	5.00	0.00	0.00	
21	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	Angka Partisipasi Kasar														
		-SD/MI		110.03	101.98	92.68	101.90	107.10	105.10	101.90	104.70	102.75	101.90	104.70	102.75	
		-SMP/MTS		99.84	93.99	94.14	93.99	104.30	110.97	93.99	103.56	110.18	93.99	103.56	110.18	
22		Angka Partisipasi Murni														
		-Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		92.30	94.60	102.49	90.51	94.10	103.97	90.51	92.40	102.09	90.51	94.00	103.86	
		-Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS		79.15	81.20	102.59	89.62	82.40	91.94	89.62	79.65	88.88	89.62	100.00	111.58	

### **2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan**

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pendidikan Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pendidikan. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan.

Tabel 2.12  
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Dinas Pendidikan

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	6.019.055.300  75%	5.649.246.900	95,35		..			
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator :	545.284.400	519.929.317	95,35		100			
	- Jasa Listrik Dinas Pendidikan	12 Bulan			12 Bulan	100			
	- Jasa Air Dinas Pendidikan	12 Bulan			12 Bulan	100			
	- Jasa Telepon Dinas Pendidikan	12 Bulan			12 Bulan	100			
	- Jasa Benwith 49 sekolah (SD,SLTP,SKB) 10 Mbps	12 Bulan			12 Bulan	100			
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan indikator :	137.432.450	130.217.900	94,75%		100			
	- Honor cleaning service	24 ob			24 ob				
	- Honor penjaga malam	36 ob			36 ob				
	- Jasa cleaning service ketiga belas	2orang			2orang				

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	- Jasa ketiga belas penjaga malam	3 orang			3 orang				
	- Belanja Jasa laundry	1 disediakan			disediakan				
	- Peralatan rumah tangga	12 bulan			12 bulan				
	<b>3. Penyediaan alat tulis kantor Dengan indikator:</b>	<b>63.184.200</b>	<b>61.061.034</b>	<b>96,64</b>		<b>100</b>			
	- Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan			12 bulan				
	- Materai 6000	1450 buah			1450 buah				
	- Materai 3000	1400 buah			1400 buah				
	- Belanja pos lainnya	1 disediakan			disediakan				
	<b>4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dengan indikator</b>	<b>32.739.250</b>	<b>27.956.250</b>	<b>85,39</b>		<b>100</b>			
	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	9 jenis			9 jenis				
	<b>5. Penyediaan makan dan minum Dengan indikator</b>	<b>24.310.000</b>	<b>15.175.000</b>	<b>62,42</b>		<b>81,81</b>			
	- Tersedianya makan dan minum pegawai rapat dan tamu	11 bulan			9 bulan				
	<b>6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Dengan indikator</b>	<b>109.860.000</b>	<b>95.278.399</b>	<b>86,73</b>		<b>100</b>			
	- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar	12 bulan			10 bulan	100			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	daerah								
	<b>7. Penyediaan pendukung administrasi perkantoran</b> Dengan indikator	<b>5.106.245.000</b>	<b>4.799.629.000</b>	<b>94</b>					
	- Pendidik dan kependidikan k2 (52) orang	624 ob			624 ob				
	- Pendidik dan kependidikan sekolah (179 orang)	2148 ob			2148 ob				
	- Jasa pegawai kontrak (16 orang)	162 ob			162 ob				
	- Jasa pegawai kontrak sukarela dinas pendidikan (21 orang)	252 ob			252 ob				
	- Pengurus dan pengelola barang dinas (1 orang)	12 ob			12 ob				
	- Pembantu pengurus dan pengelola barang dinas (2 orang)	24 ob			24 ob				
	- Pengurus barang sekolah (26 orang)	312 ob			312 ob				
	- Uang lembur asn dan non asn	12 bulan			12 bulan				
	- Pembayaran honor bendahara pengeluaran	12 ob			12 ob				

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	- Pembayaran honor pembantu bendahara pengeluaran	60 ob			60 ob				
	- Pembayaran honor pendahara penerima	12 ob			12 ob				
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur:</b>								
	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran								
	<b>1. Pengadaan mebeleur</b> Dengan indikator	<b>25.000.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>98</b>		<b>100</b>			
	- Meja kerja	1 unit			1 unit				
	- Kursi tamu	1 unit			1 unit				
	<b>2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /operasional</b> Dengan indikator	<b>187.535.000</b>	<b>151.130.050</b>	<b>80,59</b>		<b>100</b>			
	- Roda 2	27 unit			27 unit				
	- Roda 4	4 unit			4 unit				
	- Roda 6	1 unit			1 unit				
	<b>3. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor</b> Dengan indikator	<b>134.622.146</b>	<b>126.795.900</b>	<b>94,19</b>		<b>100</b>			
	- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1 paket			1 paket				

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	- Pemeliharaan peralatan gedung kantor	8item			8item				
	- Pemeliharaan mobiler (meja)	1 disediakan			1disediakan				
	- Pemeliharaan mobile (almari)	7 unt			7 unt				
	- Perbaikan plafon	1 paket			1 paket				
	- Rehab wc	1 paket			1 paket				
	- Rehab parkir dan lantai	1 paket			1 paket				
	<b>4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor</b> Dengan indikator	<b>223.940.000</b>	<b>213.336.000</b>	<b>95,26</b>		<b>100</b>			
	- Penghancur kertas	1 unit			1 unit				
	- komputer	8 unit			8 unit				
	- printer	2 unit			2 unit				
	- ac	4 unit			4 unit				
	- soundsystem	1 paket			1 paket				
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur:</b> Dengan indikator								
	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM Aparatur								
	<b>1. pendidikan pelatihan nonformal</b> Dengan indikator	<b>161.568.300</b>	<b>151.835.400</b>	<b>93,98</b>		<b>100</b>			
	- bimtek pengelolaan keuangan yang dapat diikuti	1 kegiatan			1 kegiatan				

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	- jumlah peserta bimtek pengelolaan perencanaan dan keuangan sekolah	62orang			62orang				
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan:</b> Dengan indikator								
	- indeks kepuasan masyarakat	<b>Baik</b>							
	- nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	<b>BB</b>							
	- tingkat kematangan implementasi SPIP	<b>Level 3</b>							
	- persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	<b>100</b>							
	- persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	<b>90</b>							
	1. penyusunan pelaporan kinerja keuangan SKPD	36.039.500	32.115.650	89,11		<b>100</b>			
	- laporan capaian kinerja OPD	4 dokumen			4 dokumen				
	- laporan triwulan /semesteran/ dan prognosis	2 dokumen			2 dokumen				
	- laporan akhir tahun	1 dokumen			1 dokumen				

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	- LKPJ	1 dokumen			1 dokumen				
	- LPPD	1 dokumen			1 dokumen				
	- LAKIP	1 Dokumen			1 dokumen				
	- Penyusunan profil pendidikan	1 dokumen			1 dokumen				
	- RENJA	1 dokumen			1 dokumen				
	- Tersedianya dokumen capaian laporan kinerja keuangan SKPD	100%			100%				
<b>Urusan Pendidikan</b>									
<b>1</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator:</b>		<b>2.145.292.869</b>			<b>20,00</b>			
	1. Jumlah PAUD formal/nonformal yang terakreditasi A	5 Paud			1 Paud	20,00%			
	2. Persentase guru pendamping PAUD formal sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi	48 %			87,50%	182,29%			
	3. Persentase guru pendamping PAUD nonformal sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi	36.70 %			54,02%	147,19%			
	<b>Kegiatan:</b>								
	<b>1. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dengan indikator:</b>	3.012.200	1.803.200	60%		0 %			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	-Pelatihan Guru PAUD -Pelatihan Managemen penyusunan kurikulum -Jumlah Guru PAUD yang terampil di bidang karya ilmiah	- - 30 Orang			- - 0 orang	0 %			
	<b>2. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini</b> dengan indikator:	34.157.050	29.374.400	86%		60%			
	- Lomba-lomba anak usia dini	0 Cabang			0 Cabang	0 %			
	- Pembibitan dan pembinaan sentra anak usia dini	60 siswa			60 siswa	100%			
	- Jumlah Anak yang Mengikuti Lomba PAUD Tingkat Propinsi	0 anak			0 anak	0%			
	- Peringatan HANI Tingkat Nasional	1 keg			1 keg	0%			
	- lomba anak pada kreatifitas gugus PAUD	0 cabang			0 cabang	0%			
	<b>3. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini</b> dengan indikator:	124.588.220	110.720.453	89%		100%			
	- Penyediaan Dana BOP TK Pembina/ BOP PAUD	1 tk			1 tk	100%			
	- Survey/ Evaluasi PAUD	53 lembaga			53 lembaga	100%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	<b>4. Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan RPP PAUD</b> dengan indikator:	20.795.000	15.822.466	76%		100%			
	- Jumlah Kurikulum PAUD yang tersedia	75 dok			0 dokumen	0 %			
	<b>5. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD</b> dengan indikator :	1.847.436.850	1.763.551.850	95%		100%			
	- Honor Guru Asuh PAUD	202 orang			202 orang	100%			
	- Honor Pengelola PAUD	53 orang			53 orang	100%			
	- Honor Guru TK Swasta	35 orang			35 orang	100%			
	- pakaian muslim guru paud	192 stel			192 stel	100%			
	<b>6. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD</b> dengan indikator :	9.527.900	6.767.900	71%		67%			
	- Lomba-lomba Pendidik PAUD Tingkat Kota Solok	0 cabang			0 cabang	0%			
	- Rapat Koordinasi HIMPAUDI	50 orang			50 orang	100%			
	- Pertemuan Gugus PAUD dan TK	1 kali			1 kali	100%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	<b>7. Pelatihan Parenting PAUD</b> dengan indikator :	1.420.000	990.000	70%		0%			
	- Jumlah Orang tua yg mengikuti Parenting PAUD	0 orang			0 orang	0%			
	<b>8. Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD</b> dengan indikator :	209.215.000	183.861.000	88%		100%			
	- Jumlah ruang kelas yang di rehab ( TK pembina )	2 ruang			2 ruang	100%			
	- Jumlah toilet paud yang di rehab (TK pembina)	1 ruang			1 ruang	100%			
	<b>9. Pengadaan Sarana Belajar PAUD</b> dengan indikator :	32.450.000	32.401.600	100%		100%			
	- alat permainan edukatif (APE) yang tersedia	1 paket			1 paket	100%			
	- koleksi buku PAUD yang tersedia	1 paket			1 paket	100%			
<b>2</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b> dengan indikator :	<b>9.834.725.500</b>	<b>9.196.506.360</b>						
	Rasio siswa per ruang kelas SD/SDLB/MTs	26			24.00	107.69			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	rasio siswa per ruang kelas SMP/MTs	32			31.00	103.13			
	Jumlah sekolah SD/MI yang terakreditasi A	27 sekolah			28.00	103.70			
	Jumlah sekolah SMP/MTs yang terakreditasi A	6 sekolah			5.00	83.33			
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
	- SD	0 sekolah			0.00	100.00			
	- SMP	0 sekolah			0.00	100.00			
	Persentase sekolah yang memiliki labor komputer yang representatif (SMP negeri)	83,30 %			100.00	120.05			
	Jumlah perolehan medali OSN SD/MI dan SMP/MTs	2 medali			0.00	0.00			
	Jumlah perolehan medali FLS2N SD/MI dan SMP/MTs	2 medali			0.00	0.00			
	<b>1. Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa</b> dengan indikator :	150.000.000	149.696.829	100%		100%			
	- Pengadaan Buku koleksi perpustakaan SD	3 paket			3 paket	100%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	<b>2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</b> dengan indikator :	720.000.000	719.790.940	100%		100%			
	- pengadaan peralatan laboratorium komputer	1 paket			1 paket	100%			
	- pengadaan media pendidikan	10 paket			10 paket	100%			
	<b>3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala bangunan Sekolah</b> dengan indikator :	1.712.388.300	1.693.027.050	99%		100%			
	- Pemeliharaan Sedang/ Berat Gedung dan Bangunan SD	1 paket			1 paket	100%			
	- perencanaan rehab RKB, Perpustakaan dan toilet SD	1 paket			1 paket	100%			
	- Jumlah ruang kelas yang di rehab	16 ruang			16 ruang	100%			
	<b>4. Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Dasar</b> dengan indikator :	1.567.800	1.432.200	91%		0%			
	- Naskah Akademik ranperda pendidikan	0 dok			0 dok	0%			
	<b>5. Pembangunan Sanitasi Sekolah</b> Dengan indikator								

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	Pembangunan Sanitasi SD	0 paket			0 paket				
	<b>6. Pembangunan Pagar Sekolah</b> dengan indikator :	40.292.800	39.992.800	99,26		100%			
	- perencanaan desain pembangunan pagar SMP	2 paket			2 paket	100%			
	<b>6.Rehabilitasi sedang/Berat taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir SD</b> dengan indikator :	13.699.300	13.549.300	99%		100%			
	- Perencanaan desain pemeliharaan sedang/berat gedung dan bangunan	1 paket			1 paket	100%			
	<b>7.Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMP/MTs</b> dengan indikator :	42.535.650	41.025.650	96%		100%			
	- Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional SMP	3 sekolah			3 sekolah	100%			
	<b>8. BOP Sekolah SMP</b> dengan indikator :	1.879.900.000	1.427.058.600	76%		100%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	- Tersedianya Operasional Pendidikan	6 sekolah			6 sekolah	100%			
	<b>9. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD</b> dengan indikator :	18.523.300	16.863.300	91%		20%			
	- Jumlah Siswa Terbaik FLS2N Tingkat Kota	0 siswa			0 siswa	0%			
	- Jumlah Siswa Terbaik OSN Tingkat Kota	6 siswa			6 siswa	100%			
	- Jumlah Siswa Terbaik LCSPN Tingkat Kota	0 siswa			0 siswa	0%			
	- Jumlah Siswa Terbaik FLS2N Tingkat Kota	0 siswa			0 siswa	0%			
	- Terfasilitasinya Sekolah yang Bercirikan Khusus (Sirkus)	0 sekolah			0 sekolah	0%			
	<b>10. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD/MI</b> dengan indikator :	60.017.400	59.597.400	99%		100%			
	- Jumlah sekolah Dasar yang dibantu biaya operasional	6 SD/MI			6 SD/MI	100%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	<b>11.BOP Sekolah SD</b> dengan indikator :	1.601.508.250	1.467.155.591	92%		100%			
	- Tersedianya Operasional Pendidikan	51 sekolah			51 sekolah	100%			
	<b>11. Pembinaan Bakat dan Prestasi Siswa SLTP</b> dengan indikator :	51.238.400	51.238.400	100%		100%			
	- Jumlah siswa terbaik olimpiade sains per cabang tingkat kota	63 siswa			63 siswa	100%			
	- Jumlah siswa terbaik OPSI/ LPIR tingkat kota	35 siswa			35 siswa	100%			
	<b>12. Pemeliharaan sedang/berat bangunan sekolah SMP</b> dengan indikator :	2.079.736.300	2.068.468.000	99%		100%			
	- Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SMP)	6 paket			6 paket	100%			
	- Rehabilitasi ruang kelas SMP	6 ruang			6 ruang	100%			
	- Rehabilitasi Labor komputer	1 ruang			1 ruang	100%			
	- Rehabilitasi pustaka	1 ruang			1 ruang	100%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	- Rehabilitasi ruang guru	1 ruang			1 ruang	100%			
	<b>13. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD beserta perabotnya</b> dengan indikator :	1.448.318.000	1.432.610.300	99%		100%			
	- Ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	4 ruang			4 ruang	100%			
	<b>14. Rehab Sedang/Berat Jamban Toilet SMP</b> dengan indikator :	15.000.000	15.000.000	100%		100%			
	- Rehabilitasi Jamban Toilet 01 Tanah Garam	1 ruang			1 ruang	100%			
<b>3</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b> dengan indikator :	<b>1.478.861.340</b>	<b>884.651.778,00</b>						
	Jumlah lembaga/kursus yang terakreditasi A	5 lembaga			2.00	40.00			
	Jumlah warga belajar yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	9 orang			0.00	0.00			
	<b>1. Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan</b> dengan indikator :	0		0					

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	- jumlah peserta keaksaraan usaha mandiri	0 orang			0 orang	0%			
	- jumlah peserta yang mengikuti HAI tingkat nasional	0 orang			0 orang				
	<b>2. pengembangan pendidikan kecakapan hidup dengan indikator</b>								
	- jumlah peserta pelatihan bordir manual	0 orang			0 orang	0%			
	- jumlah peserta pelatihan kecantikan wajah dan kulit	0 orang			0 orang	0%			
	- Jumlah peserta pelatihan aksesoris mutiara	0 orang			0 orang	0%			
	- Survey petugas PKH	0 orang			0 orang	0%			
	- Pelatihan menjahit dasar	0 orang			0 orang	0%			
	- Pelatihan menjahit terampil	0 orang			0 orang	0%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	- Pelatihan magang keterampilan khusus otomotif	0 orang			0 orang	0%			
	- Pelatihan keterampilan kaligrafi	0 orang			0 orang	0%			
	<b>3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal</b>	0	0			0%			
	- Terlaksananya rehab bengkel kerja (DAK)	3 ruang			0 ruang				
	<b>4. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Non Formal</b> dengan indikator :	485.123.990	421.778.828	87%		100%			
	- Tersedianya biaya operasional pendidikan non formal	12 bulan			12 bulan	100%			
	- Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan			12 bulan	100%			
	- Jumlah Alat listrik yang tersedia	12 bulan			12 bulan	100%			
	- Jumlah Peralatan dan alat kebersihan yang tersedia	12 bulan			12 bulan	100%			
	- Tersedianya Listrik, air dan telepon	12 bulan			12 bulan	100%			
	- Jumlah kendaraan roda dua yang terpelihara	12 bulan			12 bulan	100%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	- Jumlah cetakan blangko dinas yang tersedia	12 bulan			12 bulan	100%			
	- Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	12 bulan			12 bulan	100%			
	- Jumlah jasa Petugas kebersihan dan penjaga malam yang dibayarkan	12 bulan			12 bulan	100%			
	- Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 bulan			12 bulan	100%			
	- Operasional Rusunawa	12 bulan			12 bulan	100%			
	<b>5. Penyelenggaraan Paket A Setara SD</b> dengan indikator :	25.500.000	0	0%		0%			
	Jumlah peserta Paket A Setara SD	20 orang	-		0 orang	0%			
	<b>6. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP</b> dengan indikator :	87.500.000	33.055.400	38%		100%			
	Jumlah peserta Paket B Setara SMP	45 orang			45 orang	100%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	<b>7. Penyelenggaraan Paket C Setara SMA-IPS</b> dengan indikator :	103.900.000	23.847.800	23%		100%			
	Jumlah Peserta yang mengikuti paket C	45 orang			45 orang	100%			
	<b>8. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan</b> dengan indikator :	4.551.350	4.298.750	94%		100%			
	- Jumlah pengelola LKP yang mengikuti pelatihan akreditasi	0 orang			0 orang	0%			
	- Jumlah pengelola PAUD yang mengikuti Pelatihan akreditasi	0 orang			0 orang	0%			
	- Jumlah pengelola PAUD yang mengikuti pembinaan akreditasi	13 orang			13 orang	100%			
	<b>9. Pengadaan Alat Praktek/peralatan pendidikan</b>	50.000.000							

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	- Pengadaan peralatan keterampilan	0 paket			0 paket	0 %			
	<b>10. Pembangunan Prasarana Belajar SKB</b> dengan indikator :	473.500.000	401.671.000	85%		0%			
	- jumlah ruang praktek yang dibangun	0			0	0%			
	- jumlah toilet (jamban) beserta satitasinya yang	1 ruang			1 ruang	100%			
	- Pembangunan ruang praktek baru beserta perabotnya	1 ruang			1 ruang	100%			
	- Perencanaan Pembangunan SKB	1 ruang			1 ruang	100%			
	<b>11. Rehabilitasi Prasarana Penunjang Belajar SKB</b> dengan indikator :	298.786.000	298.786.000	100%		100%			
	- Jumlah Ruang Taman Bacaan Masyarakat yang di rehab	1 ruang			1 ruang	100%			
	- jumlah ruang pamong yang di rehab	1 ruang			1 ruang	100%			
	- jumlah ruang praktik yang di rehab	0 ruang			0 ruang	0%			
	- rehab ruang bengkel kerja	2 ruang			2 ruang	100%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
4	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator :</b>	<b>627.327.100</b>	<b>526.792.500</b>						
	Persentase guru yang memenuhi standar kualifikasi akademis								
	- SD	100 %			98.57	98.57			
	- SMP/MTs	97 %			97.72	100.74			
	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik:								
	- SD	95 %			53.95	56.79			
	- SMP/MTs	100 %			59.34	59.34			
	<b>1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik dengan indikator :</b>	<b>5.952.400</b>	<b>1.772.700</b>	<b>30%</b>		<b>0 %</b>			
	- Jumlah Guru SMP yang bersertifikasi	211 orang			0 orang	0 %			
	- Jumlah Guru SD yang bersertifikasi	331 orang			0 orang	0 %			
	- Jumlah Guru TK/PAUD yang bersertifikasi	25 orang			0 orang	0 %			
	- Koordinasi Juknis Sertifikasi	2 kali			0 kali	0 %			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	<b>2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b> dengan indikator :	<b>492.204.000</b>	<b>407.491.500</b>	<b>83%</b>		<b>100%</b>			
	- Jumlah Kepala sekolah berprestasi tingkat Kota	0 orang			0 orang	0 %			
	- Jumlah Guru berprestasi tingkat Kota	0 orang			0 orang	0 %			
	- Jumlah Guru terbaik pada olimpiade Guru tingkat Kota	0 orang			0 orang	0 %			
	- Jumlah Guru Terpilih Untuk Program Guru Idola dan Hebat (Gurih)	0 orang			0 orang	0 %			
	- Peningkatan Kopetensi Pengawas, Kepala Sekolah, Dan Guru Tk, Sd Dan SMP	60 orang			60 orang	100 %			
	<b>3.Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)</b> dengan indikator :	<b>25.935.100</b>	<b>24.372.300</b>	<b>94%</b>		<b>56%</b>			
	- KKG Guru Kelas 1	0 dokumen			0 dokumen	0%			
	- KKG Guru Kelas 2	1 dokumen			1 dokumen	100%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	- KKG guru Kelas 3	0 dokumen			0 dokumen	0%			
	- KKG Guru kelas 4	0 dokumen			0 dokumen	0%			
	- KKG Guru Kelas 5	0 dokumen			0 dokumen	0%			
	- KKG Guru Kelas 6	0 dokumen			0 dokumen	0%			
	- KKG Guru PAI	1 dokumen			1 dokumen	100%			
	- KKG Guru Penjaskes	2 dokumen			2 dokumen	100%			
	- Rapat Gugus SD	1 kali			1 kali	100%			
	<b>3. Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tenaga Kependidikan</b> dengan indikator :	73.545.000	63.832.300	87%		100%			
	- Penilaian Angka Kredit Guru	500 orang			500 orang	100%			
	- Penilaian Kinerja Guru (PAK dan DUPAK)	1700 orang			1700 orang	100%			
	<b>4. Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP</b> dengan indikator :	29.690.600	29.323.700	99%		100%			
	Terlaksananya MGMP tingkat SMP	4 MP			4 MP	100%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
5	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b> dengan indikator :	860.282.200	834.101.950			-			
	Rata -Rata UN SD	8 nilai			-	-			
	Rata -Rata UN SMP	6 nilai			-	-			
	Persentase siswa yg mengikuti kegiatan MABIT SLTP	90 %			100	100			
						-			
	<b>1. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan</b> dengan indikator :	80.866.700	76.258.000	94%		100%			
	- Perawatan dan pemeliharaan ICT Kantor Dan Sekolah	1 paket			1 paket	100%			
	- Jumlah Profil Pendidikan	1 dokumen			1 dokumen	100%			
	- Jumlah Website Pendidikan yang Terpelihara	1 website			1 website	100%			
	- master plan jaringan dapodik	1 dokumen			1 dokumen	100%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	<b>2. Penyelenggaraan Malam Bina Iman dan Taqwa ( MABIT)</b> dengan indikator :	<b>151.412.250</b>	<b>151.412.250</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>			
	- Jumlah Siswa yang mengikuti MABIT	3500 orang			3500 orang	100%			
	- Pedoman penyelenggaraan MABIT	100 buah			100 buah	100%			
	- Buku Kontrol siswa	4000 buah			4000 buah	100%			
	- pengadaan Al-Quran	840 buah			840 buah	100%			
	<b>3. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan SLTP</b> dengan indikator :	<b>324.715.500</b>	<b>320.074.000</b>	<b>99%</b>		<b>100%</b>			
	- Pembuatan Soal US/USBN	13 mapel			13 mapel	100%			
	- Jumlah Ijazah SMP	1546 orang			1546 orang	100%			
	- Kurikulum SMP yang di Validasi	1 dokumen			1 dokumen	100%			
	- Jumlah Siswa yang mengikuti tryout UN	3 paket			3 paket	100%			
	<b>4. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Sekolah</b> dengan indikator :	<b>1.146.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>99%</b>		<b>0%</b>			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	- Jumlah PAUD/TK terbaik yang memiliki lingkungan sekolah yang sehat	0 sekolah			0 sekolah	0%			
	- Jumlah SD/MI terbaik yang memiliki lingkungan sekolah yang sehat	0 sekolah			0 sekolah	0%			
	- Jumlah SLTP terbaik yang memiliki lingkungan sekolah yang sehat	0 sekolah			0 sekolah	0%			
	<b>5. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan SD dengan indikator :</b>	<b>302.141.750</b>	<b>285.223.700</b>	<b>94%</b>		<b>100%</b>			
	- Jumlah peserta Ujian Semester I dan II	8900 orang			8900 orang	100%			
	- Jumlah peserta ujian Semester I dan II, Pra US dan US	1500 orang			1500 orang	100%			
	- Try Out SD	3 kali			3 kali	100%			
	- terlaksananya PPDB	1 kegiatan			1 kegiatan	100%			
	<b>Pembinaan dan Pemasarakatan Seni dan Olahraga Pelajar</b>	<b>46.479.400</b>	<b>46.058.800</b>						

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	dengan indikator :								
						0			
	<b>1. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan</b> dengan indikator :	<b>45.345.400</b>	<b>45.344.800</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>			
	Jumlah atlit yang dibina di sentra								
	- Atlit Karate	12 atlit			12 atlit	100%			
	- Atlit Pencak Silat	22 atlit			22 atlit	100%			
	- Atlit Bulu Tangkis	10 atlit			10 atlit	100%			
	- Atlit Atletik	34 atlit			34 atlit	100%			
	- Altit Renang	10 atlit			10 atlit	100%			
	- Atlit Senam	10 atlit			10 atlit	100%			
	<b>Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga</b> dengan indikator :	<b>1.134.000</b>	<b>714.000</b>	<b>63%</b>		<b>100%</b>			
	- Jumlah Perolehan Medali Pada O2SN	0 cabang			0 cabang	0%			
	- Jumlah Perolehan Medali pada FLS2N/OLSN	0 medali			0 medali	0%			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
<b>6</b>	<b>Program Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b> dengan indikator :	<b>11.861.890.789</b>	<b>10.759.887.741</b>						
	Angka Partisipasi Kasar								
	-SD/MI	101.90			104.70	102.75			
	-SMP/MTS	93.99			103.56	110.18			
	Angka Partisipasi Murni								
	-Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	90.51			94.00	103.86			
	-Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	89.62			100.00	111.58			
	<b>1. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Dasar (SD)</b> dengan indikator :	<b>6.682.273.238</b>	<b>6.073.598.700</b>	<b>91%</b>		<b>100%</b>			
	Tersedianya Belanja Operasional Pendidikan	40 sekolah	6.073.598.700		40 sekolah	100%			
	<b>2. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b> dengan indikator :	<b>5.153.603.001</b>	<b>4.686.289.041</b>	<b>91%</b>		<b>100%</b>			

No	Program / Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi				Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Anggaran (Rp.)	(%)	Fisik	(%)			
	Tersedianya Belanja Operasional Pendidikan	6 sekolah			6 sekolah	100%			
	<b>3. Koordinasi Monitoring Evaluasi BOS</b> dengan indikator :	26.014.550	22.794.550	88%		100%			
	Rapat Koordinasi Pelaksanaan BOS	1 kali			1 kali	100%			
	Monitoring Pelaksanaan BOS SD	47 sd			47 sd	100%			
	Monitoring Pelaksanaan BOS SMP	9 smp			9 smp	100%			

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas pendidikan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

### 2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan sebagai berikut:

1. Kondisi Covid-19 akan mempengaruhi kemampuan akademis siswa dalam untuk menyerap pelajaran mengingat proses tatap muka sangat terbatas dilakukan.
2. Masih berubahnya stigma masyarakat tentang sekolah favorit, menyebabkan pola penerimaan siswa dengan system zonasi masih belum berjalan dengan baik, karena masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat
3. Penyediaan sekolah Boarding Negeri yang sampai saat ini masih belum terealisasi karena pembangunan membutuhkan biaya yang sangat besar
4. Belum tersedianya sekolah khusus inklusi sehingga masyarakat yang berkebutuha khusus masih terbatas untuk bersekolah

### 2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Pendidikan untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Selalu memperbaharui Teknik pembelajaran dengan system dalam jaringan (daring) dan menyederhanakan kurikulum sehingga materi dasar dapat dimengerti oleh siswa.
2. Melakukan pemerataan kualitas seluruh sekolah, sehingga masyarakat yakin bahwa semua sekolah memiliki kualitas yang sama dan penerimaan siswa berdasarkan zonasi dapat terlaksana dengan baik

3. Mengembangkan pola-pola lain untuk sekolah boarding, sehingga dapat memfasilitasi keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah boarding
4. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan Tenaga Pendidik dengan pelatihan-pelatihan khusus untuk siswa inklusi, sehingga siswa inklusi dapat bersekolah di mana saja tanpa harus membangun sekolah khusus inklusi.

## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pendidikan diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pendidikan telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pendidikan.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Walikota Kota Solok Nomor 36 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pendidikan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pendidikan yaitu: 1. Belum meningkatnya pemerataan kesempatan Pendidikan 2. Belum meningkatnya daya saing Lembaga Pendidikan. Permasalahan tersebut dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Permasalahan**

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum Meningkatnya Pemerataan Kesempatan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Angka Putus Sekolah
2	Belum Meningkatnya Daya Saing Lembaga Pendidikan	Akreditasi Pendidikan Dasar dengan Nilai A Akreditasi Paud dengan Nilai A

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Pendidikan dapat dirincikan sebagai berikut:

#### Permasalahan 1

Belum Meningkatnya Pemerataan Kesempatan pendidikan

Akar masalah 1

1. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah
2. Masih adanya Masyarakat Putus Sekolah

Permasalahan 2

Belum meningkatnya daya saing Lembaga Pendidikan

Akar masalah 2

1. Persentase akreditasi Pendidikan dasar dengan nilai A
2. Persentase akreditasi PAUD dengan nilai A

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Solok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Solok pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota solok menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Solok baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Solok untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

#### Visi

Adapun visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”**

Dari visi tersebut terlihat masa depan kondisi masyarakat kota Solok sampai tahun 2026 adalah:

1. **Kota yang diberkahi** adalah kota yang masyarakatnya mengimplementasikan pengamalan syariat agama dalam semua tatanan kehidupan yang dilandasi oleh iman dan taqwa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS Al A'Raf:96 “ *Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan*”. Sehingga terbangun masyarakat yang sholeh dalam beramal, sholeh dalam berfikir dan sholeh dalam bertindak sebagai wujud pembangunan masyarakat madani. Masyarakat Madani yang dimaksudkan disini adalah masyarakat Kota Solok yang hidup aman serta patuh pada aturan atau ketentuan hukum tertentu dan menjalankan nilai agama, adat dan budaya di segala bentuk tatanan masyarakat.
2. **Maju** adalah Kondisi infrastruktur kota dan fasilitas publik yang lebih baik dalam menunjang percepatan pertumbuhan perdagangan dan jasa.
3. **Sejahtera** adalah Peningkatan standar hidup masyarakat yang makmur ditandai dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
4. **Perdagangan dan jasa yang modern** adalah pembangunan Kota Solok yang didominasi oleh perdagangan dan jasa diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

#### Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya.
2. Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial
4. Optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

Dinas pendidikan secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai misi ketiga yaitu **“Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial**, dengan melakukan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian misi ketiga tersebut.

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan baik formal, nonformal dan informal diawali dengan melakukan pemetaan mutu dan SDM (pendidik dan tenaga pendidikan), sehingga dapat dilakukan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan tatakelola yang tepat sasaran. Hal ini akan menjamin akuntabilitas dan meningkatkan citra publik penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah juga akan menjamin kelanjutan pendidikan ke jenjang menengah dan perguruan tinggi bagi siswa berprestasi, tahfiz quran dan siswa dari keluarga yang kurang mampu. Untuk itu akan diselenggarakan beasiswa pendidikan serta kerjasama penyelenggaraan pendidikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pemerataan kualitas layanan lembaga penyelenggara pendidikan dilakukan melalui pemerataan kualitas sarana prasarana pendidikan pada lembaga pendidikan formal, non formal dan informal. Untuk mencapai pendidikan yang unggul, Kota Solok akan membangun sekolah berasrama, mengembangkan sekolah inklusi, dan memfasilitas pengembangan mutu pendidikan menengah, pesantren dan perguruan tinggi yang ada di kota Solok.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi

#### 3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan

Untuk mendukung RPJMN 2020-2024, terdapat 2 (dua) agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas pokok kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. Agenda Pembangunan Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan arahan kebijakan :
  - a. Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan yang berkualitas, dengan strategi:
    - i. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran

- ii. Peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan disemua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
  - iii. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
  - iv. Penguatan penjaminan mutu Pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan Pendidikan dan antar wilayah
  - v. Peningkatan tata kelola pembangunan Pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan
- b. Meningkatkan produktifitas dan daya saing
- i. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industry dan
  - ii. Penguatan Pendidikan tinggi berkualitas
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkokoh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter
- i. Revolusi mental dalam system Pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong dan budi pekerti
  - ii. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsive
  - iii. Pembinaan ideologi Pancasila, Pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism
- b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
- i. Revitalisasi dan aaktualisasi nilai budaya dan kearifan local untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, gotong royong dan kerja sama antar warga
  - ii. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat
  - iii. Perlindungan hak dan kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif

- iv. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia dan
- v. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan
- c. Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas
  - i. Peningkatan budaya literasi
  - ii. Pengembangan pembinaan dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan aksara daerah serta sastra
  - iii. Penguatan institusi social penggerak literasi dan inovasi

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### 1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah:

- a. angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini meningkat;
- b. Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun tuntas dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun meningkat; dan
- c. angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat.

Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:

- 1. meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi *stunting* pada balita;
- 2. membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD;
- 3. menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD;
- 4. mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD;
- 5. menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (*crowdfunding*); dan
- 6. menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan PAUD.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan peningkatan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah:

1. memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
2. mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
3. membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun; dan
4. melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya:
  - a. melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pelaksanaan program *retrieval* untuk anak putus sekolah;
  - b. membuat program/strategi untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
  - c. menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama;
  - d. memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum; dan
  - e. melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti Pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah:

1. meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi;
2. meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, salah satunya dengan memperkuat Universitas Terbuka sebagai *platform* pembelajaran Pendidikan tinggi jarak jauh;
3. meningkatkan peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi;
4. menyediakan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin melalui KIP Kuliah; dan

5. mendorong kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam pendidikan tinggi.

**2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah:**

- a. kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional (*instructional leadership*) menguat;
- b. kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;
- c. percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana;
- d. mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat;
- e. teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;
- f. penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna;
- g. proses pembelajaran meningkat mutunya;
- h. kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah meningkat;
- i. jumlah perguruan tinggi kelas dunia bertambah; dan
- j. pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industri.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kepemimpinan instruksional (*instructional leadership*) di sekolah adalah:

1. memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah; dan
2. mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan adalah:

1. mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak;
2. mengembangkan Balai Guru Penggerak (*Center of Excellence*) di setiap provinsi untuk menciptakan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa di sekolah;
3. melakukan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui seleksi masuk yang lebih baik, kurikulum yang berorientasi pada praktik dan penggunaan

- teknologi, pengajar yang menguasai praktik di sekolah, dan ujian kelulusan yang menekankan keterampilan mengajar dan kemampuan berefleksi;
- berkonsultasi dengan pemerintah daerah agar Guru Penggerak dapat diarahkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, seperti menjadi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan;
  - bekerja sama secara erat dengan pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan;
  - menerapkan berbagai inovasi termasuk *multi-subject teaching* untuk meningkatkan ketersediaan guru dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan efektivitas; dan
  - membuka akses satuan pendidikan dan guru terhadap pembiayaan di luar APBN seperti: pembiayaan oleh daerah, pihak ke-3 (contoh: Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, CSR, investasi DU/DI) ataupun dari dana BOS dan TPG untuk mendukung pembiayaan bagi upaya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

- meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
- memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
- merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah dan setiap satuan pendidikan;
- mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
- memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan; dan
- memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD adalah:

- menyiapkan kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
- memperjelas jenis layanan PAUD yang dimaksud untuk mendukung pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;

3. menyiapkan mekanisme dan sistem insentif untuk pengelolaan dan penjaminan mutu layanan PAUD; dan
4. mendorong tersusunnya kurikulum PAUD memiliki relevansi dan implementasi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terutama yang terkait dengan pemenuhan capaian SDG.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran adalah:

1. Mengembangkan *platform* pembelanjaan barang dan jasa bagi sekolah, agar pembelanjaan lebih berkualitas serta mengurangi beban administrasi kepala sekolah dan guru, dengan demikian kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan perhatian mereka pada kualitas pembelajaran siswa;
2. Mengembangkan *platform* identifikasi guru penggerak dari seluruh Indonesia secara massal untuk selanjutnya dimobilisasi menggerakkan guru-guru lain.
3. Mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar;
4. Menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sama (*preloaded*) untuk mendukung guru di daerah dengan keterbatasan jaringan internet;
5. Menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong *peer-review* praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar guru; dan
6. Meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan system informasi bagi para pemangku kepentingan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:

1. Menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional Pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru;
2. Mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu Pendidikan dasar dan menengah (internal dan eksternal) yang lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah (*school excellence*) dan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah dan hasil belajar siswa (*formative assessment*), untuk mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik-praktik baik global maupun masukan dari masyarakat dan DU/DI;
3. Memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (LPMP, Dinas Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan;

4. Mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;
5. Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas serta memanfaatkan informasi diagnostik dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar guna meningkatkan proses pembelajaran;
6. Mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas guru/instruktur/pelatih/dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi;
7. Menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat otomatis bagi yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan indikator mutu bagi seluruh peringkat akreditasi, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat; dan
8. Mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah:

1. Mendorong guru untuk mengubah strategi pembelajaran yang berlandaskan paradigma pengajaran (*teaching*) menjadi strategi pembelajaran kreatif berlandaskan paradigma pembelajaran (*learning*), berpusat pada peserta didik dan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi;
2. Memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran di sekolah-sekolah lain;
3. Membina guru agar dapat menyiapkan rencana pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik (normal, remedial, dan pengayaan);
4. Mengembangkan kurikulum di semua jenjang dan jalur Pendidikan yang dapat didiversifikasi melalui adopsi, adaptasi atau disesuaikan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang didasarkan atas kebutuhan, konteks dan karakteristik daerah;
5. Melakukan program-program khusus kepada siswa-siswa yang memiliki kompetensi kurang atau di bawah standar minimum;

6. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DU/DI, untuk melakukan penguatan dan pendampingan pada satuan pendidikan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan;
7. Pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi, melalui *experiential learning* di industri, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program pendidikan; dan
8. Pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah adalah:

1. Mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti AKM, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;
2. Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi diagnostik untuk peningkatan pembelajaran dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM;
3. Mendorong penerapan penilaian portofolio yang relevan untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa yang bersifat performatif, artistik, kreatif, dan inovatif;
4. Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas guna meningkatkan proses pembelajaran; dan
5. Mengizinkan dan mendorong penggunaan portofolio dan asesmen yang lebih otentik untuk penilaian sumatif kelulusan jenjang sekolah.

### 3. Peningkatan Relevansi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi Pendidikan adalah:

- a. Kemampuan literasi dan numerasi meningkat;
- b. Perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana; dan
- c. Kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kemampuan literasi dan numerasi untuk mendorong relevansi pendidikan adalah:

1. Melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi dan numerasi;

2. Mengembangkan strategi penguatan pembelajaran numerasi secara menyeluruh (kelas 1-12);
3. Mengembangkan kompetensi guru yang berfokus pada kompetensi mengajar literasi dan numerasi di kelas awal (1-3 SD/MI);
4. Menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan; dan
5. Memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan ketersediaan sumber daya bagi guru yang mengajarkan literasi dan numerasi di kelas awal.

#### 4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter

Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter adalah:

- a. Nilai-Nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter;
- b. Peran Kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat;
- c. Cagar budaya terkelola dengan baik;
- d. Kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik; dan
- e. Sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah:

1. Membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:
  - a. Memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;
  - b. Menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya;
  - c. Mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
  - d. Menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum;
  - e. Menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar; dan
  - f. Menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.
2. Memperkenalkan survei keadaan sekolah (*school climate survey*) untuk mempromosikan budaya positif sekolah; dan

3. Mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (*children wellbeing*).

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan adalah:

1. Melakukan penguatan budaya dan bahasa daerah dalam mata pelajaran seperti Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Muatan Lokal;
2. Melakukan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di semua mata pelajaran – terutama yang banyak mengadopsi istilah-istilah asing (Sains, Matematika dan Pendidikan Agama);
3. Melakukan penguatan dan pemutakhiran konten-konten sejarah untuk memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas bangsa Indonesia;
4. Mendorong kegiatan pertukaran antar pelaku budaya dari latar belakang yang berbeda untuk menyelenggarakan tata interaksi yang inklusif dalam ekosistem kebudayaan di Indonesia;
5. Memperkuat inisiatif mandiri masyarakat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menunjang gerakan pelestarian dan pemajuan budaya;
6. Melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada nilai-nilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan adaptasi praktis di dunia modern; dan
7. Membantu pengembangan muatan lokal - terutama bahasa daerah - dengan penekanan pada pelestarian bahasa dan budaya daerah oleh masyarakat lokal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan efisiensi satuan pendidikan adalah mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan administrasi birokrasi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah adalah:

1. Melakukan pendekatan asimetris untuk memenuhi kebutuhan setiap pemerintah daerah, alih-alih pendekatan '*one-size fits all*' di seluruh pemerintah daerah; dan
2. Pemerintah pusat sebagai penunjang, fasilitator, dan konsultan untuk pemerintah daerah;

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah:

1. Membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Pendidikan;
2. Memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyelaraskan kebijakan; dan
3. Membantu Kemendagri dan Kemenkeu untuk melakukan evaluasi anggaran pendidikan kabupaten/kota.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok**

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pendidikan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas pendidikan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas pendidikan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas pendidikan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembengan wilayah Kota Solok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Solok untuk kawasan Solok dijabarkan sebagai berikut:

Penataan ruang wilayah Kota Solok perlu dikelola pemanfaatannya secara optimal, agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Sebagai salah satu bentuk sumberdaya alam, ruang tidak mengenal batas wilayah. Namun jika dikaitkan dengan pengaturannya, ruang haruslah mengenal batas dan sistemnya. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar dapat menurunkan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan. Berikut diuraikan program pembangunan wilayah strategis dalam RTRW Kota Solok.

Kawasan Strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Fungsi kawasan strategis adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan, melestarikan, melindungi dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung

- penataan ruang wilayah kota;
- b) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;
  - c) Untuk memudahhi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang;
  - d) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota;
  - e) Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.

Kawasan strategis Kota Solok meliputi:

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- 2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dan merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

- 1) Kawasan Pasar Kota Solok berlokasi di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Koto Panjang, dan Kelurahan Kampung Jawa;
- 2) Kawasan Wisata Pulau Belibis berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa;
- 3) Kawasan Strategis Terminal Bareh Solok di Kelurahan Simpang Rumbio; dan
- 4) Kawasan Agribisnis di Kelurahan Tanah Garam.

B. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam dengan kawasan penyangganya yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam.

### 3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengkajian pembangunan berkelanjutan berdasarkan atas empat pilar SDGs/TPB, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Dalam melakukan pengkajian tersebut, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan analisis capaian TPB di Kota Solok sesuai dengan kajian disimpulkan bahwa.

Pada dasarnya semua target TPB yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus tercapai, karena tPB tersebut menganut prinsip “no one left behind”, akan tetapi karena keterbatasan keuangan daerah dalam pencapaian target TPB tersebut, sehingga dilakukanlah proses penyaringan untuk menentukan isu TPB mana yang sifatnya strategis dan menjadi prioritas untuk dicapai terlebih dahulu.

Hasil klhs menyatakan bahwa terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target TPB yang perlu dicapai pada tahun 2030. Kesenjangan tersebut menjadi dasar dalam perumusan isu strategis dalam KLHS ini. Disamping kesenjangan capaian TPB, Tim Pembuat KLHS juga melakukan penjaringan isu TPB melalui konsultasi publik dan melihat isu dari kondisi baseline daya dukung daya tampung lingkungan hidup.

Adapun isu strategis yang dikemukakan dalam dokumen KLHS adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan potensi di bidang perdagangan dan jasa
2. Peningkatan ahli fungsi lahan untuk dijadikan permukiman penduduk
3. Penurunan daya dukung pangan
4. Peningkatan daya dukung air bersih
5. Peningkatan kebutuhan rumah layak huni
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas
7. Peningkatan timbuln sampah

### 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok, telaahan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Solok dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pendidikan sebagai berikut:

## **ISU DI TINGKAT INTERNASIONAL**

### **1. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai dari tahun 2000-2015. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
- b. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
- c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d. Menurunkan angka kematian anak;
- e. Meningkatkan kesehatan ibu;
- f. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
- g. Memastikan kelestarian lingkungan hidup;
- h. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015. MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2016-2030 antara lain :

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- c. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- d. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar

- seumur hidup untuk semua;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
  - f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
  - g. Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
  - h. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
  - i. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
  - j. Mengurangi kesenjangan didalam dan antar nagara;
  - k. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
  - l. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
  - m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
  - n. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
  - o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
  - p. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan;
  - q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

## **2. PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID) 19**

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah *covid-19*, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan– China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur

dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah *Covid-19*. Masing-masing negara merevisi APBN-nya dan menyediakan alokasi dana yang besar untuk mengatasi corona ini. Mengingat bahwa penyakit yang datang melalui virus corona cukup mematikan (rata-rata sekitar 3-5% kematian dari korban yang telah terpapar virus), lalu obat paten belum ditemukan, maka hanya solusi pencegahan yang menjadi jalan terbaik untuk diupayakan agar masing-masing negara dapat melindungi setiap nyawawarganya.

Berbagai negara melakukan kebijakan *lockdown*. Kebijakan *lockdown* kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh berbagai negara. Ada yang menerapkan secara penuh, sebagian, atau lokal dan seminimal mungkin. Indonesia sendiri memodifikasinya dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu aturan mengenai PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak *covid-19* menyatakan bahwa akan terjadi pelambatan ekonomi dunia di tahun 2020 ini, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia juga tidak luput akan adanya kemungkinan terjebak pada bahaya defisit anggaran yang tidak berkelanjutan. Ketika *covid-19* mulai merebak di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Perintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Pada Pasal 2 Perpu tersebut, pemerintah dimungkinkan untuk merelaksasi pembatasan defisit anggaran lebih dari 3 persen. Disebutkan di pasal tersebut bahwa batasan defisit anggaran boleh melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu disikapi sekaitan dengan *pandemi covid-19* ini:

- a. Perlambatan ekonomi yang ditandai oleh kapitalisasi pasar pada kuartal pertama ini adalah yang terburuk dalam sejarah dan masih akan terpuruk dalam jangka waktu yang belum dapat diprediksi. Beberapa sektor bisnis, terutama minyak dan

gas, transportasi udara, perawatan kesehatan, dan keuangan akan mengalami pertumbuhan negatif yang cukup lama, dan kemungkinan baru akan pulih paling cepat setelah tahun 2021 atau 2 tahun setelah *pandemi covid-19* ini.

- b. Dampak pada sektor ketenagakerjaan, Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) menerbitkan *ILO Monitor 2nd edition* pada April 2020, dimana laporan ini menguraikan beberapa hal penting menyangkut dampak *covid-19* terhadap kondisi ketenagakerjaan seluruh dunia, antara lain: *pertama*, kebijakan karantina wilayah di berbagai negara berdampak pada 2,7 miliar pekerja (81 persen dari total pekerja di seluruh dunia), *Kedua*, kontraksi ekonomi secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan kerja. Perhitungan ILO per 1 April 2020 menunjukkan penurunan jam kerja sebesar 6,7 persen pada kuartal kedua 2020 atau setara dengan hilangnya 195 juta pekerjaan penuh waktu. *Ketiga*, perhitungan total kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 tergantung pada perkembangan pandemi ini, bagaimana pemerintah masing-masing negara mengantisipasinya, serta penemuan obat dan vaksin sehingga diketahui kepastian berakhirnya pandemi. ILO akan terus memantau dan diperkirakan bahwa jumlah orang yang menganggur sampai laporan ini dibuat meningkat sebesar 24,7 juta dari angka tahun 2019 sebesar 188 juta. *Keempat*, ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja. Perkiraan ILO menunjukkan bahwa sekitar 1,25 miliar pekerja atau 38 persen dari total pekerja terancam akan diberhentikan yang meliputi sektor perdagangan ritel, akomodasi dan makanan, dan manufaktur. *Kelima*, khususnya di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, sektor-sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dimana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial, atau punya tetapi dalam keadaan minimal. Para pekerja ini kini berada dalam kondisi paling rentan di antara kelompok pekerja lainnya. *Keenam*, pekerja di sektor kesehatan sangat rentan terhadap paparan risiko kesehatan dan risiko ekonomi. Walaupun belum ada angka seluruh dunia yang resmi, berbagai laporan menunjukkan besarnya korban pada para tenaga kesehatan terutama yang berhubungan langsung dengan *pandemi covid-19*. *Ketujuh*, respon kebijakan harus diarahkan ke bantuan segera untuk pekerja dan sektor-sektor usaha tertentu untuk melindungi mata pencaharian. Terutama di negara-negara berkembang dan di sektor-sektor tertentu dengan dampak yang signifikan. Dengan demikian, ketika pandemi

berlalu, negara dapat memulihkan ekonomi lebih cepat.

## ISU DI TINGKAT NASIONAL

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. Visi Presiden 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

**Gambar 4. 17**  
***Misi Presiden 2020-2024***



Sumber : RPJMN 2020-2024

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang terdiri dari:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air,

sumber daya energi, serta kehutanan; dan

- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan mental dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;

- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.  
Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:
  - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
  - c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
  - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
  - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri

Pertahanan.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024. Sasaran makro pembangunan nasional yang diproyeksi di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.10.

**Tabel 4. 10**  
**Target Kinerja Nasional Tahun 2024 dalam RPJMN 2020-2024**

No	Indikator pembangunan	Target 2024 (RPJMN 2020-2024)
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,2-6,5%
2	Tingkat Kemiskinan	6,0-7,0%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,6-4,3%
4	Rasio Gini sebesar	0,360-0,374
5	Indeks Pembangunan Manusia	75,54
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,3%

Sumber : RPJMN 2020-2024

Sedangkan target pembangunan untuk wilayah Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 10**  
**Target Pembangunan Nasional untuk Provinsi Sumatera Barat 2020-2024**

No	Indikator pembangunan	Target RPJMN 2020-2024 untuk Provinsi Sumatera Barat				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	5,50	5,80	6,00	6,10
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,94	5,46	5,13	4,85	4,55
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,50	5,30	5,20	4,70	4,40

Sumber : RPJMN 2020-2024

Disain perencanaan jangka menengah tersebut kini harus mengalami berbagai pergeseran ketika tahun 2020, tahun awal periode RPJMN, difokuskan pada penanganan Covid-19. APBN 2020 difokuskan untuk mitigasi Covid-19 agar dampak ekonomi dan sosial akibat virus ini dapat diminimalkan sampai keadaan bisa segera pulih. Penanganan pandemi covid-19 mengubah rencana dan strategi pembangunan berbagai sektor yang telah

dipersiapkan Pemerintah Indonesia, salah satunya target pembangunan yang berubah seiring dengan perubahan proses kerja.

Perencanaan pembangunan pasca *covid-19* merupakan tantangan berat bagi seluruh negara di dunia. Kehidupan normal baru masyarakat dimana sampai saat ini belum ada obat paten untuk menyembuhkan *covid-19* dan juga vaksin untuk mencegahnya menjadikan bahwa hal yang pasti kalau masyarakat dunia akan hidup bersama *covid*, atau dalam istilah lugas Panji Hadisoemarto adalah hidup dalam ancaman *covid-19* setiap saat.

Indonesia harus dapat menyusun skenario sendiri dengan asumsi bahwa obat paten dan vaksin baru akan lama ditemukan, dan yang pasti tidak akan terjadi dalam jangka pendek. Bagaimana menggerakkan ekonomi ketika kehidupan normal baru memerlukan perubahan budaya yang sangat drastis akan perilaku masyarakat. Pemerintah memberikan panduan bagaimana kehidupan normal baru yang harus dilakukan masyarakat dalam 7 norma, yaitu: (1) cuci tangan; (2) menghindari menyentuh area wajah; (3) menerapkan etika batuk dan bersin saat batuk atau bersin karena tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh; (4) gunakan masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain; (5) Jaga jarak sosial agar terhindar dari paparan virus; (6) isolasi mandiri. Ini dilakukan bagi yang merasa tidak sehat, seperti memiliki beberapa gejala sakit, yakni demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak napas; dan (7) menjaga kesehatan dengan memastikan kesehatan fisik, berjemur sinar matahari pagi, mengonsumsi makanan bergizi, dan melakukan olahraga ringan.

Untuk skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru ini, pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi. Pertama, tetap dengan rencana semula yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dengan sedikit penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman *covid-19*.

Kedua, melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi *covid-19*, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca *covid-19*.

Ketiga, merombak seluruh program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca *covid-19* dan krisis ekonomi yang mengiringinya. Dalam hal ini semua program yang telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024 dikaji ulang, dirumuskan kembali strateginya, dan dijadwal ulang periode pelaksanaannya.

## ISU DI TINGKAT REGIONAL

### ISU/KEBIJAKAN SUMATERA BARAT DALAM PEMBANGUNAN TAHAP IV(2021-2025) RPJPD TAHUN 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 mendatang dapat diformulasikan secara ringkas sebagai berikut: **“Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025”**. Sedangkan Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi *“Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”*,
2. Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik,
3. Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,
4. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,
5. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Adapun arah kebijakan pembangunan tahap IV (2021-2025) Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Pembangunan Agama dan Budaya
  - a. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang agamais dan berbudaya, pembangunan agama dan budaya diarahkan pada peningkatan pemahaman keagamaan secara simultan. Disamping itu, prasarana teknologi informasi perlu pula disediakan pada pusat-pusat kegiatan masyarakat. Nuansa keagamaan juga terwujud secara fisik (bangunan) seperti gapura dan bangunan lainnya pada setiap batas provinsi, kota, kabupaten bahkan sampai ke nagari.
  - b. Untuk dapat mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat pendidikan bernuansa islam, diwujudkan melalui model sekolah dengan penggemblengan keagamaan yang intensif terutama moral, minimal disetiap

kabupaten dan kota.

- c. Dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial dan pengembangan kelembagaannya, direalisasikan melalui pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat serta institusi keagamaan sesuai ketentuan syari'ah.
  - d. Pengelolaan tanah ulayat sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan tidak terdapat lagi konflik-konflik sosial yang terjadi akibat pelaksanaan sistem tersebut.
  - e. Penguatan dan pemanfaatan keanekaragaman sosial budaya melalui berbagai ruang gerak pembangunan. Akses dan pemerataan modal sosial yang multikural telah menjadi pola kebijakan yang inheren dalam pembangunan daerah.
  - f. Pelestarian tanah ulayat dengan membangun pola kemitraan antara tiga unsur utama, yaitu pemerintah daerah, masyarakat adat dan stakeholders.
2. Pembangunan Hukum dan Pemerintahan.
- a. Memperkuat basis pengetahuan dan kinerja aparatur yang makin profesional dengan pemanfaatan lebih lanjut teknologi informasi dalam jaringan birokrasi, di samping pembinaan kesadaran moral dan loyalitas aparatur pemerintah/pegawai negeri yang amanah (bersih dan berwibawa) di mata masyarakat.
  - b. Mengarahkan unsur dunia usaha swasta terus menerus meningkatkan kemandirian dan daya saing dalam skala lokal, nasional dan global guna memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan tata pemerintahan yang baik pada umumnya dan penguatan basis ekonomi rakyat khususnya.
  - c. Unsur masyarakat warga makin didorong untuk makin pro-aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan, termasuk dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- a. Penyelenggara pendidikan yang terakreditasi, dan masing-masing daerah memiliki penyelenggara pendidikan ranking nasional. Penyelenggaraan pendidikan secara profesional.

- b. Menerapkan standar pelayanan Rumah Sakit sesuai standar internasional.
  - c. Menerapkan IPTEKS yang menghasilkan perbaikan teknologi terhadap kegiatan yang telah ada serta menghasilkan produk-produk baru yang dapat mendorong kegiatan produksi secara produktif dan efisien dan dapat bersaing di dunia global.
4. Pembangunan Ekonomi.
- a. Dalam rangka mewujudkan kegiatan pertanian modern dan agribisnis maju, pembangunan diprioritaskan pada lanjutan pembangunan kawasan sentra produksi dan agroindustri dengan penerapan teknologi pertanian dan pengolahan hasil yang lebih maju.
  - b. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah melalui subsektor perikanan laut upaya pematapan tumbuhnya usaha dan bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut yang bernilai ekonomi tinggi dan dapat dipasarkan ke luar negeri.
  - c. Untuk dapat mewujudkan kegiatan jasa yang efisien dan mampu bersaing, diwujudkan penggunaan teknologi tinggi dan modern dalam kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk jasa transportasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan.
  - d. Guna dapat mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional, prioritas pembangunan melanjutkan penggunaan teknologi yang lebih maju dan tepat untuk peningkatan produktifitas dan efisiensi usaha pariwisata.
  - e. Dalam rangka mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang pantai barat sumatera, maka prioroitas pembangunan melanjutkan peningkatan penggunaan teknologi maju dan tepat guna dalam rangka peningkatan produktifitas dan efisiensi usaha perdagangan, transportasi dan jasa lainnya. Pelabuhan Teluk Bayur dan BIM menjadi pintu gerbang utama untuk kegiatan perdagangan dan pariwisata dari dan menuju pantai barat pulau Sumatera.
5. Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- a. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan dilaksanakan secara konsekuen, maka seluruh kabupaten dan kota se Sumatera Barat harus mempunyai dokumen RTRW dan telah melakukan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat direalisasikan sehingga terwujud kondisi

daerah dengan ruang yang apik dan teratur.

- b. Untuk dapat mempertahankan kawasan konservasi alam yang telah ditetapkan, diupayakan terwujudnya pengembangan potensi flora dan fauna yang ada di dalam kawasan tersebut. Perlindungan terhadap kawasan konservasi yang telah ditetapkan dilakukan secara lebih intensif, sehingga tercipta suatu kawasan yang asri dan hijau dengan ekosistem yang terjaga baik.
- c. Dalam rangka mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, upaya untuk pengendalian kualitas lingkungan hidup terus dilakukan dan ditingkatkan. Sejalan dengan upaya tersebut, pengendalian terhadap kualitas air dan udara makin ditingkatkan, karena intensitas pembangunan semakin meningkat. Disamping itu pemantapan pemulihan lahan kritis dioptimalkan melalui diversifikasi tanaman untuk mengembalikan kondisi lahan secara alami dan kimiawi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar lingkungan, penyuluhan masyarakat tentang sadar lingkungan terus dilakukan dan ditingkatkan untuk seluruh lapisan masyarakat.

#### **ISU STRATEGIS KOTA SOLOK**

Mencermati kondisi tahapan akhir periode RPJPD Kota Solok, memerlukan penajaman visi sebagai “Kota Sentra Perdagangan, Jasa dan Pendidikan di Sumatera Barat”. Namun di sisi lain, beberapa permasalahan utama yang terus dihadapi daerah ini adalah rendahnya daya saing potensi unggulan daerah, terjadinya ancaman krisis global *pandemic covid-19* yang saat ini sedang dihadapi bersama dengan daerah lain. Pemerintah Kota Solok juga harus mengakomodasi dengan baik isu-isu strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), globalisasi dan kemajuan teknologi dan komunikasi.

Melambatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi utama Kota Solok seperti perdagangan dan jasa, telah terjadi 5 tahun sebelum *pandemi covid-19*. *Pandemi covid-19* makin memperparah terhadap perekonomian daerah Kota Solok yang diperkirakan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan mencapai minus 3 sampai minus 4% (pada tahun 2020).

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kota Solok untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi seperti a) meningkatkan peran sektor perdagangan dan jasa dalam melayani kebutuhan regional timur provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok Selatan, dan Dharmasraya), b) meningkatkan kualitas infrastruktur untuk kebutuhan layanan perdagangan dan jasa Kota Solok di kawasan timur provinsi Sumatera Barat, c) membangun keterkaitan usaha antar sektor UKM di kawasan regional timur Provinsi Sumatera Barat dalam menciptakan *value-added* baru

perekonomian daerah, d) mengembangkan kerjasama perdagangan sektor-pertanian, peternakan, dan perikanan antara kabupaten dan kota dengan penyediaan fasilitas perdagangan secara optimal untuk kebutuhan kawasan, e) pengembangan digitalisasi ekonomi terhadap kebutuhan perdagangan antar wilayah di sekitar Kota Solok terutama sektor pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan perikanan) pengembangan kebutuhan jasa pendidikan dan kesehatan dalam melayani kebutuhan kawasan provinsi Sumatera Barat wilayah Timur.

Dari hasil kajian terhadap kondisi Kota Solok dalam berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, dan provinsi maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Solok.

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2021-2024. Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Kota Solok adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan di Kota Solok.
- b. Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan Kota Solok lainnya.
- c. Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target- target pembangunan Kota Solok di berbagai bidang.
- d. Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Kota Solok,
- e. Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Kota Solok.
- f. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Kota Solok yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

Berdasarkan kriteria isu strategis tersebut, maka dapat disusun isu strategis Kota Solok yang berkaitan dengan dinas Pendidikan antara lain sebagai berikut:

**a. Peningkatan Daya Saing Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kota Solok harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Perbaikan kualitas pendidikan di Kota Solok dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya. Peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal, melalui kegiatan pembelajaran yang bermutu dan efektif kepada siswa. Semakin banyak pihak yang peduli dan saling bekerjasama, maka semakin besar peluang kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan adanya arah kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan USBN yang akan diterapkan yaitu ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti karya tulis. Oleh karena itu dibutuhkan guru/tenaga pendidik yang memiliki kualitas di setiap sekolah agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar siswa.

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Solok, selama 2016-2019 terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk yaitu dari 10,79 pada tahun 2016 menjadi 11,01 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Solok pada tahun 2019 untuk mengenyam pendidikan formal adalah 11,01 tahun. Setara dengan kelas 2 di tingkat Sekolah Menengah Atas. Dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, baik sarana prasarana maupun mutu pendidikan.

Sesuai Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, tertuang aturan baru soal jalur zonasi. Dimana diatur penerimaan peserta didik baru melalui Jalur zonasi (50% dari

daya tampung sekolah), jalur afirmasi (15% dari daya tampung sekolah) dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali (5% dari daya tampung sekolah) serta tambahan Jalur prestasi untuk sisa kuota yang tersedia. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Berdasarkan hal diatas untuk menyukseskan program Kemendikbud tersebut dan mengurangi permasalahan yang akan terjadi maka diharapkan semua sekolah memiliki mutu yang sama / merata.

Secara umum dalam empat ta

hun terakhir 2016-2019, terjadi peningkatan APM di Kota Solok untuk semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, angka APM berkisar pada angka 94,61 persen pada tahun 2016 menjadi 90,63 persen pada tahun 2019. Sementara APM SMP sebesar 81,17 persen menjadi 65,05 persen pada tahun 2019. Penurunan nilai APM di semua jenjang pendidikan ini memberikan gambaran akan adanya belum tertibnya masyarakat dalam mendaftar sekolah sesuai dengan umur yang ditentukan.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan secara umum. APK dapat digunakan sebagai indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing- masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Solok sampai tahun 2019 sudah mencapai 101,35% untuk tingkat pendidikan SD dan 82,04 persen untuk tingkat SMP.

Untuk itu kedepan, dalam rangka peningkatan daya saing pendidikan di Kota Solok diperlukan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan, khususnya peningkatan kompetensi guru untuk mewujudkan pendidikan yang berdaya saing

**b. Meningkatkan Kesempatan Pemerataan Pendidikan**

Tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun masih ada masyarakat yang belum mengenyam Pendidikan dan pada akhirnya menjadi beban pemerintah, padahal Pendidikan adalah satu-satunya cara keluar dari rantai kemiskinan.

Begitu juga pepatah dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Pendidikan sangatlah penting untuk berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Pendidikan seharusnya didapatkan seluruh lapisan tanpa kecuali karena setiap penduduk mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan

sudah merupakan tugas pemerintah untuk memberikan fasilitas Pendidikan untuk seluruh masyarakat.

Seperti tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dapat Pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Harapannya dengan pemerataan pada bidang Pendidikan, generasi muda masa depan dapat menyongsong keberhasilan dan dapat bersikap dinamis menghadapi perubahan global, sehingga nantinya Kota Solok dapat menjadi daerah yang maju baik dari segi pemerintahan maupun masyarakatnya.

Problema yang dihadapi masyarakat kita adalah masih adanya masyarakat yang belum mengenyam Pendidikan bahkan untuk Pendidikan dasar sekalipun. Hal ini terjadi karena masyarakat yang mempunyai paradigma bahwa Pendidikan itu mahal, entah untuk membeli buku, biaya untuk les tambahan, membeli seragam, atau keperluan lain.

Seringkali kita terkecoh dengan beberapa kisah bahwa banyak orang yang tidak berpendidikan tetapi menjadi sukses dengan cara mereka sendiri, padahal anggapan itu kurang benar karena bagaimanapun Pendidikan itu dapat memberi kita banyak informasi dan pengalaman dan dapat menjamin kehidupan kita. Tidak benar juga bahwa orang yang sukses tanpa Pendidikan itu tidak pernah sekalipun mendapat Pendidikan, bisa saja mereka mendapat Pendidikan atau pengetahuan dari luar sekolah.

## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kota Solok dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Solok berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Pendidikan sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pendidikan Kota Solok ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pendidikan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang Pendidikan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pendidikan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan untuk periode 2021-2026 adalah **“Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat”**.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatkan kesempatan pemerataan Pendidikan
2. Meningkatkan daya saing Lembaga pendidikan

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019/2020)	TARGET KINERJA SASARAN-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah  11.11 11.18 11.26 11.33 11.41 11,48	Meningkatkan kesempatan pemerataan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah:							
				· APS SD	98.94	99.4	99.4	100	100	100	100
				· APS SMP	97.27	98.2	98.25	99	99.5	99.78	100
				Angka Putus Sekolah:							
				· SD	< 1	0.04%	0.04%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%
				· SMP	< 1	0.12%	0.12%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%
		Harapan Lama Sekolah  14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38	Meningkatkan daya saing lembaga pendidikan	% Sekolah dengan Akreditasi A:							
				· SD	66.67%	60.87	65.22	73.91	82.61	86.96	91.30
				· SMP	71.43%	71.43	85.71	100	100	100	100
				% PAUD dengan Akreditasi A	20.00%	5.77	15.38	25.00	34.62	44.23	53.85



# BAB V

## STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pendidikan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

#### 5.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas pendidikan dijelaskan sebagai berikut.

## **5.2 Kebijakan**

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pendidikan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pendidikan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pendidikan.

Tabel 5.1

## Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Tahun 2021 – 2026

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang lengkap, maju dan layak	Pembangunan dan rehabilitasi gedung, ruang kelas dan bangunan pendukung lainnya	Pembangunan dan rehabilitasi gedung, ruang kelas dan bangunan pendukung lainnya	Pembangunan dan rehabilitasi gedung, ruang kelas dan bangunan pendukung lainnya	Pembangunan dan rehabilitasi gedung, ruang kelas dan bangunan pendukung lainnya	Pembangunan dan rehabilitasi gedung, ruang kelas dan bangunan pendukung lainnya	Pembangunan dan rehabilitasi gedung, ruang kelas dan bangunan pendukung lainnya
	Sarana penunjang belajar dan mengajar					
Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas	Penyediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan					
	Peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan					
Terlaksananya Tata kelola dan Pendidikan yang baik	Pengelolaan dana satuan pendidikan					

	Evaluasi dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan					
Meningkatnya Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dengan masyarakat, lembaga pihak lain	Fasilitasi pendidikan bagi siswa					
	fasilitasi pendidikan bagi mahasiswa berprestasi					
Terpenuhinya Penerapan standar mutu pendidikan di sekolah	Penyelenggaraan proses belajar					
Mengembangkan Pendidikan dan pelatihan unggulan/spesifikasi	Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Meningkatnya Pengembangan kurikulum pembelajaran muatan lokal di Sekolah	Muatan lokal Peningkatan Iman dan Taqwa					
	Muatan lokal Peningkatan Adat dan Budaya					

## Bab V Strategi dan Kebijakan

Peningkatan pelayanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus.	Penyediaan Tenaga Pendidik Untuk Anak Berkebutuhan Khusus					
Pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi yang kurang mampu.	Perhitungan Jumlah Siswa					
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan (Perpustakaan, laboratorium dll)	Perbaikan fasilitas penunjang					
Pembudayaan gemar membaca	Budaya Literasi sebelum PBM					

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat	Meningkatkan kesempatan pemerataan pendidikan	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang lengkap, maju dan layak	Pembangunan dan rehabilitasi gedung, ruang kelas dan bangunan pendukung lainnya Sarana penunjang belajar dan mengajar
		Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas	Penyediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan Peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan
		Terlaksananya Tata kelola dan Pendidikan yang baik	Pengelolaan dana satuan pendidikan Evaluasi dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan
		Meningkatnya Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dengan masyarakat, lembaga pihak lain	Fasilitasi pendidikan bagi siswa fasilitasi pendidikan bagi mahasiswa berprestasi
		Peningkatan pelayanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus.	Penyediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan
		Pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi yang kurang mampu.	Perhitungan Jumlah Siswa
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan (Perpustakaan, laboratorium dll)	Perbaikan fasilitas penunjang
		Meningkatkan daya saing lembaga pendidikan	Terpenuhinya Penerapan standar mutu pendidikan di sekolah
	Mengembangkan Pendidikan dan pelatihan unggulan/spesifikasi		Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
	Meningkatnya Pengembangan kurikulum pembelajaran muatan lokal di Sekolah		Muatan lokal Peningkatan Iman dan Taqwa Muatan lokal Peningkatan Adat dan Budaya
	Pembudayaan gemar membaca		Budaya Literasi sebelum PBM



## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan**

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2021 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pendidikan untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan terdapat pada lampiran Tabel 6.1.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

**Tabel 6.1  
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan  
Target dan Indikator Program**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kesempatan pemerataan pendidikan	1. Angka Partisipasi sekolah - Usia 7 - 12 Tahun - Usia 13 - 15 Tahun 2. angka putus sekolah - SD - SMP	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>					108.20	108.40	108.60	108.80	109.00	
					APK SD	%	108.00						
					APK SMP	%	103.00	103.05	103.10	103.15	103.20	103.25	
					APK PAUD (3-6 th)	%	51.36	53.00	55.00	57.00	58.00	60.00	
					APM SD	%	99.40	99.40	99.40	99.40	99.40	99.40	
					APM SMP	%	85.90	85.92	85.94	85.96	85.98	86.00	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	80.00	85.00	85.00	90.00	90.00	90.00	
2	Meningkatkan daya saing lembaga pendidikan	1. % akreditasi sekolah dengan akreditasi A - SD - SMP 2. % Akreditasi PAUD A											
			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>		Rasio Ketersediaan Sekolah	Rasio	1:175	1:175	1:175	1:160	1:160	1:160	
				Rasio Siswa/Kelas	Rasio	01:26	01:26	1:26	01:26	01:26	01:26		
				Rasio Guru/Siswa	Rasio	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15		
				% Pendidik Memenuhi Kualifikasi	%	98.57%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%		
				Angka Mengulang SD	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				% Sekolah Yang Merealisasikan BOS diatas 80	%	80	85	90	95	95	100
				% Sekolah Dasar Negeri yang memiliki guru pendamping anak berkebutuhan khusus	%	-	5	5	5	5	5
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pagar dan Gerbang SD 01 Tj Paku	Paket	1	1			
					Pagar SD 18 Sinapa	Paket	0	1			
					Pagar SD 21 Sp Rumbio	Paket	0	1			
					Perluasan Lahan SD 03 Kp Jawa	Paket	0	1			
					Sanitasi SD 18 Sinapa	Paket	0	1			
					Sarana Air Bersih SD 17 Laing	Paket		1			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang Kelas	Ruang	-	6	5	5	5
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang/Guru/Kepala Sekolah TU	Ruang	-	2	2	2	2
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	UKS	Ruang	-	2	2	2	2
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan	Ruang	-	1	1	1	1
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas	Ruang	-	3	3	3	3
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehab WC/Jamban	Ruang	3	10	10	10	10
				Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Meja Siswa	Buah	84	112	112	112	112
					Pengadaan Kursi Siswa	Buah	84	112	112	112	112
					Pengadaan Meja Guru Kelas	Buah	-	10	10	10	10
					Pengadaan Kursi Guru Kelas	Buah	-	10	10	10	10
					Pengadaan Meja Guru	Buah	-	10	10	10	10
					Pengadaan Kursi Guru	Buah	-	10	10	10	10
					Pengadaan Meja Siswa	Buah	-	325			

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Rehabilitasi perpustakaan SDN 17 Laing	Paket	1						
					Rehabilitasi RKB SD Beserta perabotnya	Sekolah	4						
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Laptop	Buah	-	4	4	4	4	4	4
					Pengadaan IN FOCUS	Buah	-	4	4	4	4	4	4
					Pengadaan printer	Buah	-	2	2	2	2	2	2
					Media pendidikan SD	paket	10						
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kelompok Kerja Guru (KKG)	Orang	6	100	100	100	100	100	100
					Pelatihan Peningkatan Kompetensi/Motivasi Kepala Sekolah	Orang	47	50		50			
					Pelatihan Peningkatan Kompetensi/Motivasi Pengawas	Orang	10		20	20			
					Pelatihan Peningkatan Kompetensi/Motivasi Guru Sekolah								
					a. Pelatihan Multimedia		-	50	50				
					b. Pelatihan Guru Kelas	Orang	1		50	100	50	50	
					c. Pelatihan Guru mapel	Orang	3		50	50			
					Pelatihan Peningkatan Kompetensi/Motivasi Tendik	Orang	47	50	50	50			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Gaji Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Orang	174	174					
					Diklat Calon Pengawas	Orang	30	-		-	-	-	-
					Diklat Calon Kepala Sekolah	Orang	-	-	30	-	-	-	-
					Guru Inklusi	Orang	-	47	47	47	47	47	47
					Gaji Tenaga Pendidik dan Kependidikan			78	78	78	78	78	78
					Gaji ke 13 GTT dan PTT			77	77	77	77	77	77
					Gaji ke 13 guru dan pegawai yang gajinya dari Dana Boss			51	51	51	51	51	51

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Buku Alat Tulis Siswa	Siswa	8836	8841	8846	8851	8856	8861
				Buku Alat Tulis Siswa			2427				
				Tersedianya perlengkapan siswa	Paket	2427					
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	UTS dan UAS	Siswa	8836	8841	8846	8851	8856	8861
				Try Out	Siswa	1463	1468	1473	1478	1483	1488
				Assesment Kompetensi Minimal	Siswa	1509	1600	1710	1821	1910	1991
				PPDB	Siswa	1504	1509	1514	1519	1524	1529
				Assesment Kompetensi Minimal	Sekolah	41	41	41	41	41	41
				PPDB	Sekolah	41	41	41	41	41	41
				Asesment (ujian akhir SD)	SD	41	41	41	41	41	41
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kompetensi Sains Nasional	Siswa	6	6	6	6	6	6
				Festifal lomba Seni Siswa Nasional	Siswa	18	19	20	21	21	21
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah yang dilatih pengelolaan Dana BOS	Sekolah	41	41	41	41	41	41
			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Rasio Ketersediaan Sekolah	Rasio	1:422	1:422	1:422	1:410	1:410	1:410
				Rasio Siswa/Kelas	Rasio	01:30	01:30	01:30	01:30	01:30	01:30
				Rasio Guru/Siswa	Rasio	1:14	1:14	1:14	1:15	1:15	1:16
				% Pendidik Memenuhi Kualifikasi	%	95%	95%	96%	96%	96%	97%
				Angka Mengulang SMP	%	0.12	0.12	0.12	0	0	0
				% Sekolah Yang Merealisasikan BOS diatas 80	%	80%	85%	90%	95%	95%	100%
				% Sekolah Dasar Negeri yang memiliki guru pendamping anak berkebutuhan khusus	%	-	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%
				Angka Melanjutkan ke SMA	%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Orang	-	250	250	250	250	250
				Pelatihan Peningkatan Kompetensi/Motivasi Guru Sekolah							
				a. Pelatihan Multimedia	Orang	0	50	50			
				b. Pelatihan guru Mata Pelajaran	Orang	0		100	100	100	
				Angka Kredit	orang	0	300				
				Penilaian Kinerja Guru	orang	0	200				
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sistem Keamanan (Pagar, gerbang, Teralis dan CCTV)							
				Pagar dan Gerbang SMP 3	Paket	1	1				
				Pagar dan Gerbang SMP 4	Paket		1				
				WC SMP	Paket	1					
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kelas	Ruang	-	4	3	3	3	3
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang Guru	Ruang	-	1	1	1	1	1
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	UKS	Ruang	-	-	1	1	1	1
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan	Ruang	-	1	1	-	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Komputer	Laboratorium	Ruang	-	-	1	1	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Parkir	Ruang	-	1	2	1	1	1
			Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kantin	Ruang	-	1	2	1	1	1
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sistem Keamanan (Pagar, gerbang, Teralis dan CCTV)	Ruang	-	-	-	-	-	-
				Rehab WC / Jamban	Ruang	-	3	3	2	2	2
			Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Meja Siswa	Buah	-	64	64	64	64	64
				Pengadaan Kursi Siswa	Buah	-	64	64	64	64	64
				Pengadaan Meja Guru Kelas	Buah	-	5	5	5	5	5
				Pengadaan Kursi Guru	Buah	-	5	5	5	5	5

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Kelas								
				Pengadaan Meja Guru	Buah	-	5	5	5	5	5	5
				Pengadaan Kursi Guru	Buah	-	5	5	5	5	5	5
				Pengadaan Meja Siswa	Buah	-	218					
				Pengadaan Kursi Siswa	Buah	-	218					
				Tersedianya Kursi siswa SMP 2	Buah	96						
				Tersedianya Meja siswa SMP2								
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Laptop	Unit	-	4	4	4	4	4
					Pengadaan IN FOCUS	Unit	-	2	2	2	2	2
					Pengadaan printer	Unit	-	2	2	2	2	2
					Media pendidikan SMP	Paket	2					
					Peralatan teknologi informasi komunikasi (TIK) SMP	Paket	6					
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Buku Alat Tulis Siswa	Siswa	4329	4434	4339	4342	4349	4353
					perlengkapan siswa	Siswa	1028	1028				
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah yang dilatih pengelolaan Dana BOS	Sekolah	6	6	6	6	6	6
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Gaji Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Orang	78	78				
					Gaji Tenaga Pendidik dan Kependidikan			78	78	78	78	78
					Gaji ke 13 GTT dan PTT			77	77	77	77	77
					Gaji ke 13 guru dan pegawai yang gajinya dari Dana Boss			51	51	51	51	51
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	UTS dan US	Siswa	4329	4334	4339	4342	4349	4353
					Try Out	Siswa	1383	1392	1397	1402	1407	1412
					Assesment Kompetensi Minimal	Siswa	1432	1532	1632	1732	1832	1932
					PPDB	Siswa	1454	1460	1466	1472	1479	1484
					Boarding	Disediakan		1				
					Asesment	Sekolah		6				

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				PPDB	Paket		1					
				Asesment (ujian Akhir SMP)	SMP	6						
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kompetensi Sains Nasional	Siswa	9	9	9	9	9	9
					Festifal Lomba Seni Siswa Nasional	Siswa	21	22	22	22	22	22
			<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Kasi)</b>	USB TK	Ruang	-	-	50%	60%	80%	100%	
				Rasio Ketersediaan Sekolah	Rasio	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	
				Rasio Siswa/Kelas	Rasio	1:9	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	
				% Pendidik Memenuhi Kualifikasi	%	70	75	75	80	85	90	
				Rasio Guru/Siswa PAUD	Rasio	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1. Pengadaan lahan USB TK Negeri	Ruang		1				
					2. Ruang Guru	Ruang	-	-	1	-	-	-
					3. Ruang TU	Ruang	-	-	1	-	-	-
					4. Ruang Kelas	Ruang	-	-	8	-	-	-
					5 Ruang Pustaka	Ruang	-	-	1	-	-	-
					6 Ruang Kepala sekolah	Ruang	-	-	1	-	-	-
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1. Pembangunan Area Bermain TK N Pembina	Ruang	-	-	-	1	-	-
					2. Pembangunan Area Bermain TK Negeri Baru	Ruang	-	-	1	-	-	-
					3. Pembangunan toilet siswa dan guru serta Kepala Sekolah TK N Baru	Ruang	-	-	4	-	-	-
					4. Pembangunan got dan grill TK N Baru	Ruang	-	-	-	1	-	-
					5. Pembangunan koridor TK N Baru	Paket	-	-	-	1	-	-
					6. Pembangunan aula TK N Baru	Ruang	-	-	-	1	-	-
					7. Pagar TK Pembina	Paket			1			
					8. RKB Anakku Sayang	Ruang			1			
					9. RKB KB Pandan Baru Berkarya	KB			1			



**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Lemari pajang	buah	-	-	2	-	-	-	
				Meja Pimpinan	buah	1	-	1	-	-	-	
				Kursi Pimpinan	buah	1	-	1	-	-	-	
				meja Komputer	buah	1	-	1	-	-	-	
				Lemari arsip	buah	8	-	2	-	-	-	
				Rak Buku	buah	2	-	5	-	-	-	
				Lemari obat-obatan	buah	-	-	1	-	-	-	
				Mebel Siswa	TK			1				
				Mebel PAUD KB Harapan Bangsa	TK			1				
				kursi rapat	buah	13						
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1. Pengadaan APE Dalam ruang TK N Pembina	Paket		2	1	-	-	-
			2. Pengadaan APE PAUD Swasta		Paket	-	-	32	15	15	10	
			3. Pengadaan APE TK Negeri Baru		Paket	-	-	80	80	80	80	
					1. Pengadaan APE luar ruang TK N Pembina	Paket	-	1	-	-	-	-
					2. Pengadaan APE PAUD Swasta	Paket			32	15	15	10
					3. Pengadaan APE TK Negeri Baru	Paket			1	1		
					Pengadaan Perlengkapan APE	Paket	2					
				Pengadaan Perlengkapan PAUD	1. Komputer	Unit			2	1		
					2. Laptop	Unit				3	1	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1. DAK Non Fisik (BOP) APBN	Sekolah	-	72	72	72	72	72
					2. DAK Non Fisik (BOP) APBD TK N Pembina	Sekolah	-	1	1	1	1	1
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1. Monitoring dan Evaluasi Dana BOP APBN dan APBD	kali	-	100	100	100	100	100
					2. Pelatihan Manajemen Pengelola PAUD	orang		74	74	74	74	74

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Gaji Guru PAUD	orang	190	190	190	190	190	190
					Gaji Pengelola PAUD	orang	55	54	54	54	54	54
					Guru TK Swasta	orang	35	35	35	35	35	35
					Gaji Gutu TK (Dinas)	orang	49	49	49	49	49	49
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pelatihan PAUD HI		-	73	73	73	73	73
					Pelatihan Media Pembelajaran	orang	-	73	73	73	73	73
					Pelatihan IT PAUD	orang	-	73	73	73	73	73
					Pelatihan Operator Dapodik PAUD	orang	74	73	73	73	73	73
					Lomba Apresiasi PTK	orang	14	73	73	73	73	73
					Pusat Kegiatan Gugus PAUD	orang	74	14	14	14	14	14
					Pelatihan Stunting	orang		73	73	73	73	73
					Pelatihan Administrasi	orang		54				
					Pusat Kegiatan Gugus PAUD	Kali		2				
					HIMPAUDI	Kali	2	2				
					Penilaian Kinerja Guru TK	orang		20				
					Laporan pertemuan PKG PAUD	Kali	2					
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Lomba Mewarnai	Orang		73	73	73	73	73
					Lomba Kolase	Orang		73	73	73	73	73
					Lomba Tahfiz	Orang		73	73	73	73	73
					Lomba Tari	Orang		73	73	73	73	73
					Lomba Senam	Orang		73	73	73	73	73
					Lomba Plastisin	Orang		73	73	73	73	73
				<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Jumlah Warga Belajar	%	50%	50%	60%	70%	80%	95%
				Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Pengadaan mebel ruang praktik baru SKB	Ruang	-	2	2	2	2	2
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1. Pengadaan Peralatan keterampilan SKB	Ruang			2	2	2	2

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

			Nonformal/Kesetaraan	2. Pengadaan alat praktek tata boga SKB	Ruang			2	2	2	2
				3. Pengadaan alat kecantikan SKB	Ruang			2	2	2	2
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1. Pembangunan ruang praktik baru SKB	Ruang						
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1. Pembangunan toilet SKB	Ruang						
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rumah Tangga SKB	Disediakan			1	1	1	1
			- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan					3	3	3	3
			- Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Pelatihan Kecakapan Hidup	Paket			3	3	3	3
				Paket A, B, C							
				SKB	Sekolah			1			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Rehabilitasi ruang kantor beserta perabotnya	ruang	1					
				2. Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya	ruang	2					
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1. toilet (jamban beserta sanitasinya)	ruang	2					
				2. rehab ruang praktek beserta perabotnya	ruang	1					
				3. terpeliharanya WC	ruang	2					
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	% Satuan Pendidikan dasar yang menerapkan Kurikulum muatan lokal	persen	80	90	90	95	100	100
				% Satuan Pendidikan Usia Dini yang	persen	30	30	35	40	40	45

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				menerapkan Kurikulum muatan lokal								
			<b>Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	% SMP Memiliki Dokumen Kurikulum Muatan Lokal	Persen	80	90	90	95	100	100	
				% SD Memiliki Dokumen Kurikulum Muatan Lokal	Persen	80	90	90	95	100	100	
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan	Guru	659	660	660	660	660	660	
				Kurikulum Mulok	Guru		1					
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen Silabus Mulok	Dokumen	45	15	15	15	15	15	
				Jambore mabit	Paket	1						
				Malam imam dan taqwa bagi siswa	Mushola	45						
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku Mulok	Siswa	13165	13166	13167	13168	13167	13167	
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Guru Mengikuti Pelatihan	Guru	450	451	451	451	451	451	
			<b>Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	% Satuan Pendidikan Usia Dini yang menerapkan Kurikulum muatan lokal		30	30	30	35	40	40	45
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pelatihan Guru	orang	-	73	73	73	73	73	73
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pelatihan Guru	orang	-	73	73	73	73	73
				Kurikulum Mulok	orang		73	73	73	73	73	73
				Silabus kurikulum PAUD	Dokumen							

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buku Teks	orang	-	73	73	73	73	73
			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	% Pendidik SD Memiliki Sertifikat	%	65%	66%	67%	69%	70%	75%
				% Pendidik SMP Memiliki Sertifikat	%	58%	60%	62%	64%	65%	67%
				% Pendidik PAUD Memiliki Sertifikat	%	46.3%	48%	50%	52%	53%	55%
			<b>Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Jumlah Pendidik SD Memiliki Sertifikat	orang	336	336	350	350	375	375
				Jumlah Pendidik SMP Memiliki Sertifikat	orang	181	181	220	220	275	275
				Jumlah Pendidik PAUD Memiliki Sertifikat	orang	25	25	25	25	25	25
				% Guru Mapel PNS SMP Yang Memenuhi Jam Minimal Sertifikasi	%	73%	73%	73%	73%	73%	73%
				% Guru PNS SD Yang Memenuhi Jam Minimal Sertifikasi	%	73%	73%	73%	73%	73%	73%
				% Guru yang dinilai angka kreditnya	%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PAK Tahunan	orang	700	700	700	700	700	700
				Jumlah Guru Yang Dinilai Angka Kreditnya	Rentang	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150
				Guru SD yang Bersertifikasi	orang	302	302	302	302	302	302
				Guru SMP yang Bersertifikasi	orang	194	194	194	194	194	194

Tabel 6.2  
Pendanaan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kesempatan pemerataan pendidikan	1. Angka Partisipasi sekolah	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		APK SD	14,323,570,976	14,323,570,976	13,704,935,163	13,704,935,163	16,704,935,163	17,204,935,163	
		- Usia 7 - 12 Tahun			APK SMP							
		- Usia 13 - 15 Tahun			APK PAUD (3-6 th)							
		2. angka putus sekolah			APM SD							
		- SD			APM SMP							
		- SMP			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan							
2	Meningkatkan daya saing lembaga pendidikan	1. % akreditasi sekolah dengan akreditasi A										
		- SD										
		- SMP										
		2. % Akreditasi PAUD A										
			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>		Rasio Ketersediaan Sekolah							
				Rasio Siswa/Kelas								
				Rasio Guru/Siswa								
				% Pendidik Memenuhi Kualifikasi								
				Angka Mengulang SD								



**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Pengadaan Kursi Guru							
				Pengadaan Meja Siswa							
				Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Rehabilitasi perpustakaan SDN 17 Laing						
					Rehabilitasi RKB SD Beserta perabotnya						
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Laptop	72,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000
					Pengadaan IN FOCUS						
					Pengadaan printer						
					Media pendidikan SD						
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kelompok Kerja Guru (KKG)	172,446,200	750000000	1092000000	1302000000	3300000000	330,000,000
					Pelatihan Peningkatan Kompetensi/Motivasi Kepala Sekolah						
					Pelatihan Peningkatan Kompetensi/Motivasi Pengawas						
					Pelatihan Peningkatan Kompetensi/Motivasi Guru Sekolah						
					a. Pelatihan Multimedia						
					b. Pelatihan Guru Kelas						
					c. Pelatihan Guru mapel						
					Pelatihan Peningkatan Kompetensi/Motivasi Tendik						
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Gaji Tenaga Pendidik dan Kependidikan	3,488,304,000	1,884,900,000	2,584,900,000	1,884,900,000	1,884,900,000	1,884,900,000
					Diklat Calon Pengawas						
					Diklat Calon Kepala Sekolah						
					Guru Inklusi						

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Gaji Tenaga Pendidik dan Kependidikan							
				Gaji ke 13 GTT dan PTT							
				Gaji ke 13 guru dan pegawai yang gajinya dari Dana Boss							
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Buku Alat Tulis Siswa	100,000,000	507,482,000	205,207,000	205,207,000	205,207,000	205,207,000	205,207,000
				Buku Alat Tulis Siswa							
				Tersedianya perlengkapan siswa							
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	UTS dan UAS	26,854,400	95,072,628	95,072,628	95,072,628	95,072,628	95,072,628	95,072,628
				Try Out							
				Assesment Kompetensi Minimal PPDB							
				Assesment Kompetensi Minimal PPDB							
				Asesment (ujian akhir SD)							
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kompetensi Sains Nasional		220,696,600	220,696,600	220,696,600	220,696,600	220,696,600	220,696,600
				Festifal lomba Seni Siswa Nasional							
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah yang dilatih pengelolaan Dana BOS		42,535,650	42,535,650	42,535,650	42,535,650	42,535,650	42,535,650
			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Rasio Ketersediaan Sekolah		-	-	-	-	-	-
				Rasio Siswa/Kelas							
				Rasio Guru/Siswa							
				% Pendidik Memenuhi Kualifikasi							
				Angka Mengulang SMP							
				% Sekolah Yang Merealisasikan BOS diatas 80							



**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sistem Keamanan (Pagar, gerbang, Teralis dan CCTV) Rehab WC / Jamban		312,780,000	312,780,000	208,520,000	208,520,000	208,520,000
				Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Meja Siswa	200,052,000	383,597,100	116,100,000	116100000	116100000	116100000
					Pengadaan Kursi Siswa						
					Pengadaan Meja Guru Kelas						
					Pengadaan Kursi Guru Kelas						
					Pengadaan Meja Guru						
					Pengadaan Kursi Guru						
					Pengadaan Meja Siswa						
					Pengadaan Kursi Siswa						
					Tersedianya Kursi siswa SMP 2						
					Tersedianya Meja siswa SMP2						
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Laptop		56,500,000	56500000	56500000	56500000	56500000
					Pengadaan IN FOCUS						
					Pengadaan printer						
					Media pendidikan SMP						
					Peralatan teknologi informasi komunikasi (TIK) SMP						
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Buku Alat Tulis Siswa	100,542,400	254,424,800	121,102,400	121,102,400	121,102,400	121102400
					perlengkapan siswa						
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah yang dilatih pengelolaan Dana BOS		60,017,400	60017400	60017400	60017400	60017400
				Penyediaan Pendidik dan	Gaji Tenaga Pendidik		1,584,900,000	1584900000	1584900000	1584900000	1584900000

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

			Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	dan Kependidikan	1,778,190,500						
				Gaji Tenaga Pendidik dan Kependidikan							
				Gaji ke 13 GTT dan PTT							
				Gaji ke 13 guru dan pegawai yang gajinya dari Dana Boss							
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	UTS dan US	54,497,600	95072628	95072628	95072628	95072628	95072628	
				Try Out							
				Assesment Kompetensi Minimal							
				PPDB							
				Boarding							
				Asesment							
				PPDB							
				Asesment (ujian Akhir SMP)							
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kompetensi Sains Nasional		471258900	471258900	471258900	471258900	471258900	
				Festifal Lomba Seni Siswa Nasional							
			<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Kasi)</b>	USB TK							
				Rasio Ketersediaan Sekolah							
				Rasio Siswa/Kelas			-	-	-	-	-
				% Pendidik Memenuhi Kualifikasi			-	-	-	-	-
				Rasio Guru/Siswa PAUD							
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1. Pengadaan lahan USB TK Negeri			1,200,000,000	4,689,984,000			
				2. Ruang Guru							
				3. Ruang TU							
				4. Ruang Kelas							
				5 Ruang Pustaka							
				6 Ruang Kepala sekolah							
			Pembangunan Sarana,	1. Pembangunan			628,388,000	632,000,000			

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

			Prasarana dan Utilitas PAUD	Area Bermain TK N Pembina	1,300,000,000					
				2. Pembangunan Area Bermain TK Negeri Baru						
				3. Pembangunan toilet siswa dan guru serta Kepala Sekolah TK N Baru						
				4. Pembangunan got dan grill TK N Baru						
				5. Pembangunan koridor TK N Baru						
				6. Pembangunan aula TK N Baru						
				7. Pagar TK Pembina						
				8. RKB Anakku Sayang						
				9. RKB KB Pandan Baru Berkarya						
				10. USB KB Mutiara Hati						
				11. TK Baru						
				12. Lahan TK Baru						
				4. Pembangunan got dan grill TK N Baru						
				5. Tersedianya toilet (Jamban) beserta sanitasinya						
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1. Rehabilitasi berat rumah dinas penjaga sekolah TK N Pembina			375,000,000			
				2. Rehabilitasi sedang aula TK N Pembina						
				3. Rehabilitasi berat koridor TK N Pembina						
				4. Rehab ruang guru dan kepala sekolah beserta perabotnya						
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehab toilet (jamban dan sanitasinya)	100,000,000					
			Pengadaan Mebel PAUD	1. Pengadaan mobiler		0	612,265,000			





**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Lomba Mewarnai		400,788,150	400788150	400788150	400788150	400788150
					Lomba Kolase						
					Lomba Tahfiz						
					Lomba Tari						
					Lomba Senam						
					Lomba Plastisin						
				<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Jumlah Warga Belajar						
				Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Pengadaan mebel ruang praktik baru SKB						
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1. Pengadaan Peralatan keterampilan SKB						
					2. Pengadaan alat praktek tata boga SKB						
					3. Pengadaan alat kecantikan SKB						
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1. Pembangunan ruang praktik baru SKB						
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1. Pembangunan toilet SKB						
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rumah Tangga SKB						
				- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan							
				- Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Pelatihan Kecakapan Hidup		511,513,876				
					Paket A, B, C						





**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

			Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik PAUD Memiliki Sertifikat						
				% Guru Mapel PNS SMP Yang Memenuhi Jam Minimal Sertifikasi						
				% Guru PNS SD Yang Memenuhi Jam Minimal Sertifikasi						
				% Guru yang dinilai angka kreditnya						
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PAK Tahunan	316,248,800	791,929,800	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
				Jumlah Guru Yang Dinilai Angka Kreditnya						
				Guru SD yang Bersertifikasi						
				Guru SMP yang Bersertifikasi						

Tabel 6.3  
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Target dan Indikator

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perubahan renja 2022	Dokumen		1	1	1	1	1	
						dokumen renja tahun 2022 Forum OPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1
					Forum OPD	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Renja PD ( Triwulan)	Dokumen		4	4	4	4	4	
									4				
					Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKPJ)	Dokumen		2	2	2	2	2	
							2						

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Naskah Akademik Ranperda Pendidikan	Dokumen	1	1	1	1	1
				RTP	Dokumen	1	5	5	5	5
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	14	14	14
							14			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersediannya laporan keuangan akhir tahun	sekolah	1	47	47	47
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan akrual bulanan	dokumen	12	12	12	12
							12			
					Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran	dokumen	2	2	2	2
							2			
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	bulan	12	12	12	12
							12			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bulan	12	12	12	12
							12			

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum pegawai dan tamu	tahun	1	1	1	1	1
							1				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksana koordinasi dan konsultasi dalam	ok	41	41	41	41	41
							41				
					Terlaksana koordinasi dan konsultasi luar daerah	ok					
							5				
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kendaraan dinas roda 2 dinas pendidikan	Unit	5				
					Kendaraan dinas roda 2 sekolah	Unit	10				
					kursi kerja Kursi Rapat	Unit	100				
					lemari data pegawai meja 1/2 biro	Unit	25				
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air Dinas Pendidikan	m3	2911	2911	2911	2911	2911
					Listrik Dinas Pendidikan	kwh	63460	63460	63460	63460	63460
					Internet Telepon Dinas Pendidikan	bulan	12	12	12	12	12

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Jaringan Internet Dinas Pendidikan	detik	33,890	33,890	33,890	33,890	33,890	33,890
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12
					ATK pengawas SD/SMP/penilik	bulan	12	12	12	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium bendahara sekolah SMP (BPUMC SMP)	ob	72	72	72	72	72
					Honorarium cleaning service penjaga malam	ob	60	60	60	60	60
					Honorarium update data sekolah	ob	648	648	648	648	648
					Honor pembantu pengelola dan pengurus barang ( 2 orang)	ob	24	24	24	24	24
					Honor pengelola dan pengurus barang dinas (1 orang)	ob	12	12	12	12	12
					jasa ketiga belas pegawai kontrak, guru, tenaga kependidikan disekolah (BOS) (95 Orang)	orang	95	95	0	0	0

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Jasa ketiga belas pegawai kontrak, guru, tenaga kependidikan sekolah (BOP) (83 orang)	orang	83	83	0	0	0	0
				Jasa ketiga belas pendidikan dan tenaga kependidikan	orang	197	197	0	0	0	0
				Jasa ketiga belas pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah	orang	179	179	179	179	179	179
				Jasa ketiga belas pendidik dan tenaga kependidikan K2	orang	27	27	1	1	1	1
				Jasa ketiga belas tenaga kependidikan pegawai dinas pendidikan	orang	21	21	20	20	20	20
				Jasa ketiga belas tenaga kependidikan pegawai kontrak	orang	23	23	23	23	23	23
				Jasa pegawai kontrak, guru, tenaga kependidikan disekolah (BOP) (83 orang)	ob	996	996	0	0	0	0
				Jasa Ketiga belas pegawai guru, kontrak, Tenaga kependidikan disekolah							
				Jasa pendidikan tenaga kependidikan disekolah (197 orang)	ob	2364	2364	0	0	0	0

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Jasa pendidik dan tenaga kependidikan K2 (27 orang)	ob	324	324	12	12	12	12
				Jasa tenaga kependidikan pegawai dinas pendidikan (21 orang)	orang	252	252	240	240	240	240
				Jasa tenaga kependidikan pegawai kontrak (23 orang)	ob	276	276	276	276	276	276
				Jasa ketiga belas tenaga malam dan cleaning service	ob	5	5	5	5	5	5
				Jasa ketiga belas Pembayaran honor bendahara penerima	ob	12	12	12	12	12	12
				Pembayaran honor bendahara pengeluaran	ob	12	12	12	12	12	12
				Pembayaran honor pembantu bendahara pengeluaran	ob	60	60	60	60	60	60
				Pembayaran jasa laundry	Tahun	1	1	1	1	1	1
				Pendidik dan tenaga kependidikan sekolah (179 orang)	ob	2148	2148	0	0	0	0
				Tersedianya Peralatan rumah tangga	bulan	12	12				

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	4	4	4	4	4
							4				
					Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda dua	Unit	27	27	27	27	27
							27				
					Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda dua sekolah (BOP)	Unit	48	48	48	48	48
							48				
					Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 6	Unit	1	1	1	1	1
							1				
					Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	Paket	1	1	1	1	1
				Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mobiler kantor	paket	1	1	1	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pembangunan pos satpam	Paket	1	1	1	1	1

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

					pengecatan gedung kantor	Paket	1	1	1	1	1
					Rehab lantai gedung kantor	Paket	1	1	1	1	1

Tabel 6.4  
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Anggaran, Target dan Indikator

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
			Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perubahan renja 2022	Dokumen	48,572,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000	
					dokumen renja tahun 2022 Forum OPD	Dokumen							
					Forum OPD	Kegiatan							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Renja PD (Triwulan)	Dokumen		179,289,000	179,289,000	179,289,000	179,289,000	179,289,000	
					Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKPJ)	Dokumen							

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Naskah Akademik Ranperda Pendidikan	Dokumen							
				RTP	Dokumen							
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	93,378,518,343	93,378,518,343	93,378,518,343	93,378,518,343	93,378,518,343	93,378,518,343
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersediannya laporan keuangan akhir tahun	sekolah	9,704,100	47,204,100	47,204,100	47,204,100	47,204,100	47,204,100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	laporan akrual bulanan	dokumen	41,462,800	55,462,000	55,462,000	55,462,000	55,462,000	55,462,000
					Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran	dokumen						
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	bulan	11,634,100	22,384,250	22,384,250	22,384,250	22,384,250	22,384,250
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	77,974,350	77,974,350	77,974,350	77,974,350	77,974,350	77,974,350

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum pegawai dan tamu	tahun	36,920,000	36,920,000	36,920,000	36,920,000	36,920,000	36,920,000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksana koordinasi dan konsultasi dalam	ok	97,893,000	265,815,000	265,815,000	265,815,000	265,815,000	265,815,000
					Terlaksana koordinasi dan konsultasi luar daerah	ok						
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kendaraan dinas roda 2 dinas pendidikan	Unit		500,614,000	500,614,000	500,614,000	500,614,000	500,614,000
					Kendaraan dinas roda 2 sekolah	Unit						
					kursi kerja Kursi Rapat	Unit						
					lemari data pegawai meja 1/2 biro	Unit						
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air Dinas Pendidikan	m3	617,814,630	617,814,630	617,814,630	617,814,630	617,814,630	617,814,630
					Listrik Dinas Pendidikan	kwh						
					Internet Telepon Dinas Pendidikan	bulan						

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Jaringan Internet Dinas Pendidikan	detik						
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis kantor	bulan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
				ATK pengawas SD/SMP/penilik	bulan						
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium bendahara sekolah SMP (BPUMC SMP)	ob	7,844,925,200	7,844,925,200	7,844,925,200	7,844,925,200	7,844,925,200	7,844,925,200
				Honorarium cleaning service penjaga malam	ob						
				Honorarium update data sekolah	ob						
				Honor pembantu pengelola dan pengurus barang ( 2 orang)	ob						
				Honor pengelola dan pengurus barang dinas (1 orang)	ob						
				jasa ketiga belas pegawai kontrak, guru, tenaga kependidikan disekolah (BOS) (95 Orang)	orang						

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

				Jasa ketiga belas pegawai kontrak, guru, tenaga kependidikan sekolah (BOP) (83 orang)	orang						
				Jasa ketiga belas pendidikan dan tenaga kependidikan	orang						
				Jasa ketiga belas pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah	orang						
				Jasa ketiga belas pendidik dan tenaga kependidikan K2	orang						
				Jasa ketiga belas tenaga kependidikan pegawai dinas pendidikan	orang						
				Jasa ketiga belas tenaga kependidikan pegawai kontrak	orang						
				Jasa pegawai kontrak, guru, tenaga kependidikan disekolah (BOP) (83 orang)	ob						
				Jasa Ketiga belas pegawai guru, kontrak, Tenaga kependidikan disekolah							
				Jasa pendidikan tenaga kependidikan disekolah (197 orang)	ob						



**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	358,225,200	403,225,200	403,225,200	403,225,200	403,225,200	403,225,200
					Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda dua	Unit						
					Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda dua sekolah (BOP)	Unit						
					Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 6	Unit						
					Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	Paket						
				Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mobiler kantor	paket		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pembangunan pos satpam	Paket		382,526,000	382,526,000	382,526,000	382,526,000	382,526,000

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan**

					pengecatan gedung kantor	Paket							
					Rehab lantai gedung kantor	Paket							

## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **7.1. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu kepada**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Solok**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	APK PAUD (3-6 th)	%	51,36	53	53	55	57	58	60	60
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	83,59	85	87	90	93	95	97	97
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	86,44	99,4	99,40	100	100	100	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	64,99	98,2	98,25	99	99,50	99,78	100	100
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	-	80	85	85	90	90	90	90
6	Angka melanjutkan dari SMP ke SMA	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Angka putus Sekolah SD	%	-	0,04	0,04	0,04	0	0	0	0
8	Angka putus Sekolah SMP	%	-	0,12	0,12	0,12	0	0	0	0
9	Sekolah Dasar dengan akreditasi A	%	59,6	60,87	65,22	73,91	82,61	86,96	91,30	91,30
10	Sekolah Menengah Pertama dengan akreditasi A	%	62,5	71,43	85,71	100	100	100	100	100
11	PAUD Terakreditasi	%	32,9	41,1	49,3	57,5	65,8	74	82,2	82,2
12	% Peserta pelatihan yang bisa bekerja atau berwirausaha	%	-	25	25	25	25	25	25	25



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategi Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Solok untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pangan dan pertanian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok 2021-2026. Renstra Dinas Pendidikan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan.

Permasalahan pendidikan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pendidikan. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan Pendidikan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pendidikan sebagai satuan kerja

perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan pendidikan secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Solok.

